

**PENGARUH DANA DESA, PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG
PENDIDIKAN, BIDANG EKONOMI, DAN BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : M. Mustofa Kamal
Nomor Mahasiswa : 20313308
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2024

HALAMAN JUDUL

Pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, dan
Bidang Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : M. Mustofa Kamal

Nomor Mahasiswa : 20313308

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UIL. Apabila kemudian hari terbuka bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juni 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METRIS TAMPIL'. Below the stamp, the alphanumeric code '3C234ALX160435797' is printed.

M. Mustofa Kamal

HALAMAN PENGESAHAN

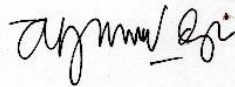
PENGESAHAN

Pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi,
dan Bidang Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan
di Provinsi Jawa Tengah

Nama : M. Mustofa Kamal
Nomor Mahasiswa : 20313308
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 27 Juni 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Prof. Drs. Agus Widarjono, S.E., M.A., Ph.D.
NIP: 933130103

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, dan Bidang Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2022

Disusun oleh : M.MUSTOFA KAMAL

Nomor Mahasiswa : 20313308

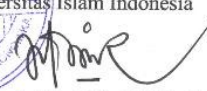
Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 06 Agustus 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Agus Widarjono, SE., MA., Ph.D

Penguji : Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
YOGY Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. 

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,
tugas akhir skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Almarhum kedua orang tua saya

Bapak Sutrisno dan Ibu Umi Nur Kholisah

Seluruh keluarga yang telah memberi nasehat, motivasi, serta dukungan dan doa
dengan tulus dan ikhlas.

Motto

Anglaras ilining banyu angeli, ananging ora keli.

Uninga sucining gandaning nabi

Artinya: Mengalir seperti air, tapi tidak hanyut terbawa arus

Selalu ingat akan kesucian harum atau ajaran Nabi.

Almamater tercinta

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim...

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dihaturkan hanya kepada Allah, Tuhan yang merajai seluruh alam. Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan kepada-Nya atas nikmat serta rahmat-Nya yang tidak terhitung, serta kekuatan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga Penulis sampaikan kepada baginda habibillah Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi perantara untuk merasakan nikmat kehidupan di zaman ini.

Dengan ikhtiar, sabar, fokus, yakin, dan kerja keras alhamdulillah penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, dan Bidang Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah." Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan di Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penulisan, Penulis menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan rendah hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Agus Widarjono, S.E., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan saran, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis Dan Ekonomika.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah menularkan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

Dosen serta seluruh staf Akademik Jurusan Ekonomi Pembangunan khususnya dan Dosen serta Staf Tata Usaha dan Staf Akademik di Lingkungan Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

6. Kepada Guru saya KH. Moch. Najib Abdul Hakim, S.Fil., M.Phil. selaku Guru, Kyai, Kakak penulis yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kawan seperjuangan Jauharil, Tegar, dan Devara yang terus memberikan semangat dan dukungan tanpa henti selama perjalanan perkuliahan.
8. Para pejuang skripsi yang satu bimbingan Fade, Farah, Oktavia, Alfinda, Lufiar, Aulia, Nabila, dan Oktaria atas dukungan yang diberikan.
9. Kepada saudara seperjuangan di Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi, Ghofar, Yusuf, Fahrian, Akmal, dan Mirza.
10. Rekan-rekan di Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2020 yang selalu solid dimanapun berada.
11. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan ikut andil serta dalam memberikan bantuan dan kontribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penutupnya, Penulis dengan sepuh hati menyadari bahwa Skripsi ini belum mencapai tingkatan kesempurnaan dan masih memiliki kekurangan. Meskipun demikian, harapannya adalah agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat serta nilai tambah bagi para pembaca. Semoga dukungan, bimbingan, dan doa yang diterima oleh Penulis dapat mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Yogyakarta, 26 Juni 2024

Penulis,



M. Mustofa Kamal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	14
1.1 Latar Belakang.....	14
2.1 Rumusan Masalah.....	26
2.2 Tujuan Penelitian	26
2.3 Manfaat Penelitian.....	27
2.4 Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	29
2.1 Kajian Pustaka	29
2.2 Landasan Teori	32
2.2.1 Kemiskinan	32
2.2.2 Pengeluaran Pemerintah	36
2.2.3 Dana Desa	38
2.2.4 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan.....	42
2.2.5 Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi	43
2.2.6 Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial	45

2.3 Hubungan antara Variabel Dependen dan Independen	46
2.3.1 Hubungan antara Dana Desa dengan Kemiskinan	46
2.3.2 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Kemiskinan	47
2.3.3 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dengan Kemiskinan	47
2.3.4 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial dengan Kemiskinan	48
2.4 Kerangka Pemikiran	48
2.5 Hipotesis Penelitian	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data	51
3.2 Definisi Operasional Variabel	51
3.2.1. Variabel Dependen (Y)	51
3.2.2. Variabel Independen (X)	52
3.3 Metode Analisis Data	53
3.3.1 Common Effect Model (CEM)	55
3.3.2 Fixed Effect Model (FEM)	56
3.3.3 Radom Effect Model (REM)	57
3.4 Pemilihan Model	58
3.4.1 Uji F	58
3.4.2 Uji LM (Langrange Multiplier)	60
3.4.3 Uji Hausman	61
3.5 Pengujian Statistik	62
3.5.1 Koefisien Determinasi	62
3.5.2 Uji F	62
3.5.3 Uji T atau Uji Parsial	64
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Analisis Deskriptif Data	66
4.2 Hasil Estimasi Model Panel	68
4.2.1 <i>Common Effect Mode</i> (CEM)	68
4.2.2 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	68
4.2.3 <i>Random Effect Model</i> (REM)	69
4.3 Uji Pemilihan Model	70

4.3.1 Uji Chow	70
4.3.2 Hasil uji LM.....	70
4.3.3 Uji Hausman.....	71
4.4 Analisis Hasil Regresi.....	71
4.4.1 Koefisien Determinan R^2 Uji Parsial (Uji T).....	71
4.4.2 Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji F).....	72
4.4.3 Uji Parsial (Uji T).....	72
4.5 Pembahasan.....	73
4.5.1 Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.....	73
4.5.2 Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.....	74
4.5.3 Analisis Pengaruh Belanja Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.....	75
4.5.4 Analisis Pengaruh Belanja Perlindungan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.	77
4.6 Analisis Intersep	78
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Implikasi	81
Daftar Pustaka.....	82
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa Tahun 2018-2022	17
Tabel 4. 1 Data Analisis Deskriptif.....	66
Tabel 4. 2 Hasil Regresi Common Effect Model (CEM).....	68
Tabel 4. 3 Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM).....	69
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Random Effect Model (REM).....	69
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow.....	70
Tabel 4. 6 Hasil Uji Langrange Multiplier.....	70
Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman	71
Tabel 4. 8 Hasil Estimasi Fixed Effect Model	72
Tabel 4. 9 Hasil Intersep Setiap Kabupaten	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	49
-------------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Grafik Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022...	18
Grafik 1. 2 Grafik Realisasi Dana Desa di 29 Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2015-2022	19
Grafik 1. 3 Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Tahun 2022	20
Grafik 1. 4 Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan Berdasarkan Total Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022	22
Grafik 1. 5 Realisasi Belanja Fungsi Ekonomi Berdasarkan Total Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022	23
Grafik 1. 6 Realisasi Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Berdasarkan Total Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.....	86
Lampiran II.....	87
Lampiran III	88
Lampiran IV	89
Lampiran V	90
Lampiran VI.....	91
Lampiran VII.....	92
Lampiran VIII	93
Lampiran IX	94
Lampiran X	95
Lampiran XI.....	96
Lampiran XII.....	97

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana desa, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang perlindungan sosial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan adalah analisis regresi data panel yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews 12. Hasil analisis regresi data panel dengan model yang dipilih yaitu Fixed Effect Model (FEM), menunjukkan bahwa dana desa, dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sesuai dengan hipotesis dan teori dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Ekonomi, Perlindungan Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi menjadi suatu hal yang menarik dikarenakan didalamnya terdiri dari banyak dinamika secara mikro ataupun makro. Di sisi lain pembangunan juga menimbulkan dampak baik itu dampak negatif maupun positif, oleh sebab itu diperlukan indikator untuk digunakan sebagai tolak ukur terjadinya pembangunan. Suatu negara dapat dikatakan sukses dalam hal pembangunan ekonomi jika negara tersebut telah menyelesaikan tiga masalah pembangunan. Ketiga masalah tersebut adalah jumlah kemiskinan yang terus meningkat, distribusi pendapatan yang semakin memburuk, dan lapangan pekerjaan yang tidak variatif sehingga tidak mampu menyerap para pencari kerja (Kuncoro, 2010).

Sejak era zaman kepemimpinan Soekarno sampai sekarang, sistem pembangunan Indonesia selalu mengalami perubahan namun tidak bertentangan dengan konstitusi, terjadinya perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan pada puncak kepemimpinan di Indonesia. Tujuan utama dari adanya pembangunan sendiri salah satunya adalah untuk mensejahterakan rakyat, sesuai dengan yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 yang isinya “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dalam pembangunan pasti ada yang namanya indikator atau tolak ukur dari pembangunan tersebut, dalam hal ini yang merupakan indikator utama dari keberhasilan pembangunan adalah laju dari penurunan jumlah penduduk miskin. Dalam hal ini tingkat efektifitas dalam upaya penurunan jumlah kemiskinan menjadi salah satu titik terberat dalam menentukan strategi atau instrumen dalam upaya penurunan kemiskinan.

Mulai dari zaman dahulu sampai dengan saat ini kemiskinan menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai pada setiap negara berkembang, tidak terkecuali negara kita tercinta Indonesia. Kita ibaratkan sebagai lingkaran setan yang tidak pernah ketemu dimana ujung dan pangkalnya. Siklus kemiskinan banyak dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemiskinan menjadi momok yang sangat menakutkan dan sulit untuk diatasi,

bahkan yang paling menakutkan bahwa yang namanya kemiskinan mungkin tidak akan pernah hilang dari dunia ini.

BPS atau Badan Pusat Statistik dan mengungkapkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah utama di negara Indonesia. Arti kemiskinan bisa sangat luas karena ini kaitannya dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti kesehatan, Pendidikan, air bersih, sanitasi, dan beberapa aspek lainnya diluar penghasilan.

Nanbee et al (2021) mengamati kemiskinan sebagai sebuah ukuran gabungan dari indikator ekonomi serta sosial pembangunan manusia yang mencakup umur panjang, pengetahuan, daya beli, dan indikator yang lainnya, dengan perspektif pengukuran kemiskina ini berdasarkan pada sudut pandang yang beragam. Ada 3 perspektif yang mendefinisikan kemiskinan (UNDP, 2003). Yang pertama adalah, perspektif pendapatan yang mengukur kemiskinan berdasar pada penurunan pendapatan dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan secara finansial. Yang kedua, bila dilihat dari perspektif kebutuhan dasar kemiskinan sebagai sebuah kekurangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan materi dasar manusia yang diterima secara sosial, makanan, kesehatan dasar, Pendidikan, layanan penting, pekerjaan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi termasuk didalamnya yang dianggap normatif. Berlanjut yang ketiga, perspektif kapasitas yang menjadi cermin ketidakmampuan dalam memiliki beberapa kemampuan dasar guna berfungsi secara memadai.

Meskipun dikatakan sulit untuk menghapus kemiskinan secara penuh, akan tetapi dalam hal ini diabaikan begitu saja karena ini dapat menyebabkan dampak negative yang besar. Ketidakmampuan untuk memperoleh sebuah pendidikan yang layak, yang selanjutnya ditambah dengan minimnya akses untuk mendapatkan kesehatan yang bermutu dan sulitnya dalam memperoleh kehidupan yang layak ini nantinya akan mengarahkan pada rendahnya produktivitas, yang hasil akhir dampak yang ditimbulkan akan menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Pendapatan yang kurang inni juga menimbulkan semakin parahnya dalam memenuhi kebutuhan dasar yang nantinya akan menyebabkan siklus kemiskinan. Sebab itulah, langkah pengambilan tindakan komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi kompleksnya masalah kemiskian yang sering terjadi

disuatu wilayah. Dalam upaya mengatasi kemiskinan secara efektif, perlu adanya pendekatan secara menyeluruh sampai pada akar permasalahan kemiskinan serta memprioritaskan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Cakupan investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, misalnya kesehatan dan pendidikan, serta menciptakan lapangan kerja atau wirausaha. Rancangan program dalam upaya pengurangan kemiskinan dan jaring pengaman sosial diharapkan mampu membantu masyarakat yang hidup dalam kemiskinan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Terdapat empat identifikasi penyebab kemiskinan yang meliputi antara lain faktor individual, sosial, kultural, dan struktural (Suharto, 2009). Dimulai dari faktor individual, ini dapat terjadi dikarenakan kondisi fisik ataupun kesehatan seseorang yang membatasi upayanya dalam bekerja dan berusaha. Pada faktor sosial terjadi sebab adanya diskriminasi sosial yang dihadapi tiap individu. Selanjutnya faktor kultural mengenai individu dengan perilaku buruk, contohnya perilaku malas baik dalam bekerja maupun ketika sedang berusaha. Sedangkan akibat dari adanya ketidakadilan sistem ekonomi yang menyebabkan kemiskinan seseorang termasuk pada faktor struktural. Adanya kemiskinan bukan masalah yang tiba-tiba muncul, akan tetapi masalah kemiskinan bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor yang sifatnya internal ataupun faktor yang sifatnya eksternal. Didalam faktor internal terdapat beberapa penyebab dari masalah kemiskinan misalnya saja kualitas dari sumber daya manusianya yang masih rendah, sedangkan dalam faktor eksternal beberapa penyebab dari masalah kemiskinan diantaranya sumber daya alam yang terbatas, kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan dalam pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, serta persaingan yang menjadi penyebab terpinggirnnya penduduk miskin.

Akses masyarakat pada sumber ekonomi masih sangat minim, meski sebenarnya dalam hal ini pemerintah sudah memberikan berbagai program dengan maksud untuk mengurangi kemiskinan namun dalam kenyataan program tersebut belum memberikan dampak yang optimal (Sigit & Kosasih, 2020). Bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini selain masih banyaknya penduduk miskin yang masih kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, sulit dijangkaunya akses pelayanan publik ditambah lagi kesenjangan pada penguasaan sumber daya yang

kedepannya akan berpotensi menyebabkan semakin meningkatnya kemiskinan. Dengan demikian diharapkan juga bagi pemerintah daerah kabupaten dapat melakukan percepatan guna mengatasi masalah kemiskinan. masalah kemiskinan yang sifatnya lokal spesifik harusnya mampu diatasi oleh pemerintah tingkat kabupaten secara tuntas.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa Tahun 2018-2022

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa (Ribuan Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	372.26	365.55	480.86	501.92	502.04
Jawa Barat	3539.4	3399.16	3920.23	4195.34	4070.98
Jawa Tengah	3867.42	3743.23	3980.9	4109.75	3831.44
DI Yogyakarta	450.25	448.47	475.72	506.45	454.76
Jawa Timur	4292.15	4112.25	4419.1	4572.73	4181.29
Banten	668.74	654.46	775.99	867.23	814.02

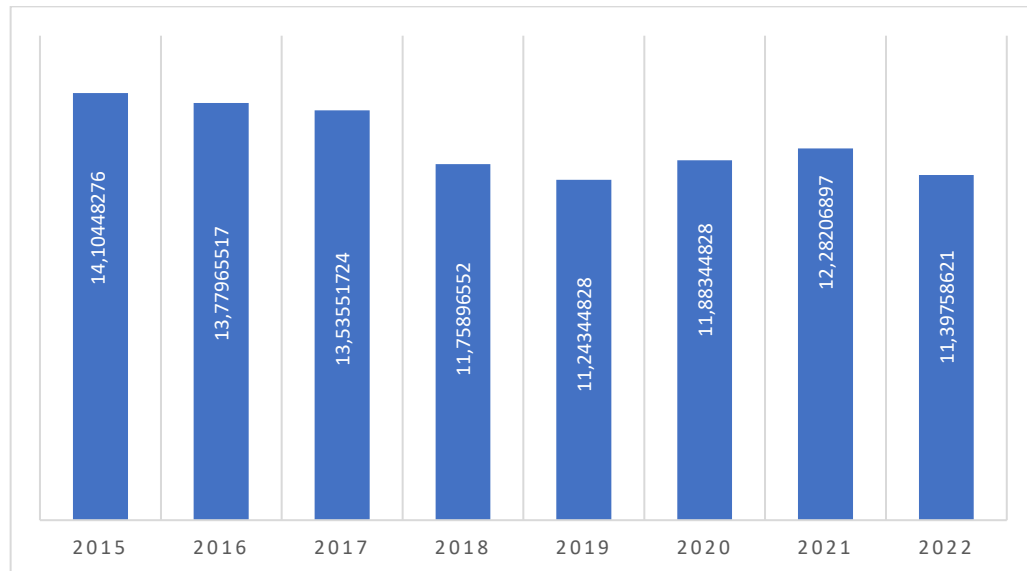
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan pada gambar tabel 1 diatas, kemiskinan merupakan suatu tantangan yang kompleks, bisa dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah mengalami kondisi yang signifikan mengenai jumlah penduduk miskin yang masih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Data tabel diatas menampilkan data statistik tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, data diatas menampilkan mengenai jumlah penduduk miskin yang ada pada Provinsi Jawa Tengah dengan menduduki peringkat kedua dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 19532.74 ribuan jiwa. Jumlah penduduk miskin yang tertinggi se Jawa pada Provinsi Jawa Timur sebanyak 21577.52 ribuan jiwa, dan dengan jumlah penduduk miskin terendah berada pada DKI Jakarta mencapai 2222.63 ribuan jiwa.

Berdasarkan grafik yang disajikan, memberikan gambaran umum mengenai jumlah penduduk miskin yang terdapat pada Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2015 sampai 2022 yang masih fluktuatif. Dimulai pada tahun 2015, jumlah kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami masa penurunan sampai pada tahun 2019, namun dengan adanya wabah Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 memberikan dampak hampir pada seluruh sektor perekonomian di dunia yang mengakibatkan jumlah kemiskinan kembali mengalami peningkatan. Tercatat pada

tahun 2020 mengalami peningkatan dari 3.569 ribu jiwa menjadi 3.793 ribu jiwa dan meningkat lagi ditahun berikutnya menjadi 3.913 ribu jiwa ini terjadi akibat dari adanya wabah Covid-19 yang menlanda seluruh dunia.

Grafik 1. 1 Grafik Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022



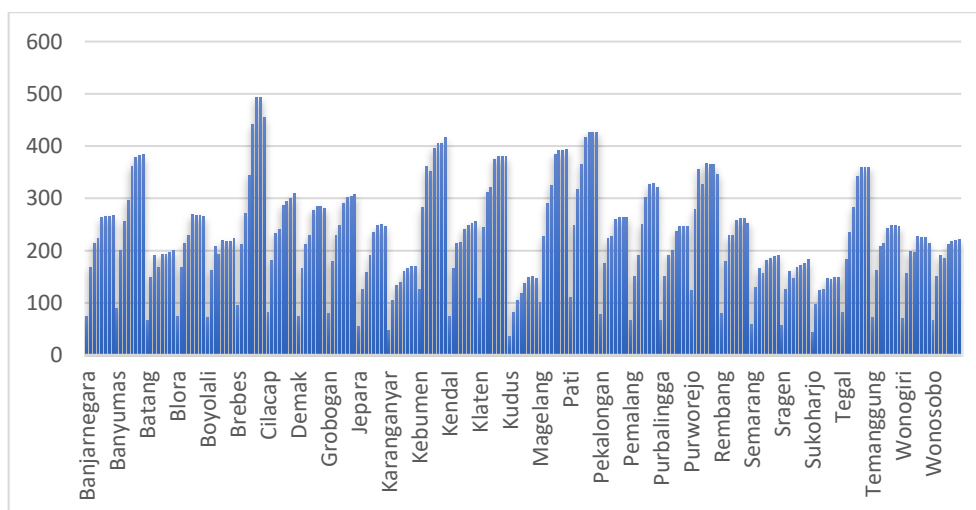
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Pemerintah memberlakukan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sudah diberlakukan dimulai sejak tahun 2015. Dengan besaran anggaran yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, tujuan dari diberlakukannya dana desa ini termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang isinya untuk mengentaskan kemiskinan di daerah. Upaya pengalokasian dana desa berdasar pada formula yang dihitung untuk memberikan perhatian kepada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luasnya wilayah, tingkat kesulitan geografis tiap masing-masing pedesaan pada kabupaten. Apabila diamati secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten dengan peningkatan penerimaan dana desa terbesar periode tahun 2015-2022. Berbanding terbalik dengan Kabupaten Kudus dengan penerimaan dana desa terkecil pada periode tahun 2015-2022 dari keseluruhan jumlah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Belanja pemerintah yang disalurkan kepada daerah melalui instansi lembaga/kementerian digunakan dalam upaya mendukung pembangunan yang sesuai dengan prioritas serta program kegiatan yang sedang direncanakan di daerah tersebut. Aliran dana yang berasal dari pemerintah pusat kepada daerah merupakan

wujud dari adanya otonomi daerah. Ini menjadikan bahwa pemerintah desa dituntut untuk mampu mengimplementasikan dari kebijakan dana desa secara transparan, akuntabel, serta benar-benar dilaksanakan sesuai pada rumusan dari aparat desa bersama dengan masyarakat. Dana desa digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas masyarakat dengan tujuan akhir untuk penanganan kemiskinan yang dituangkan dalam susunan rencana kerja pemerintah desa yang telah disepakati. Dana desa memakai prinsip hemat, dimana ini diarahkan sesuai dengan tujuan dan bermanfaat bagi masyarakat dengan terkendali (Ambya, 2020). Penggunaan dana desa dirasa efektif jika penggunaan sesuai dengan prioritas kebutuhan yang saat itu dibutuhkan. Dana desa memiliki pengaruh negarif dan signifikan terhadap kemiskinan di desa (Sigit & Kosasih, 2020). Berdasar pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa memiliki potensi sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan di pedesaan didukung dengan fungsi dan peran desa untuk mengelola potensi yang ada pada desa baik itu potensi secara fisik maupun potensi nonfisik.

Grafik 1. 2 Grafik Realisasi Dana Desa di 29 Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2015-2022



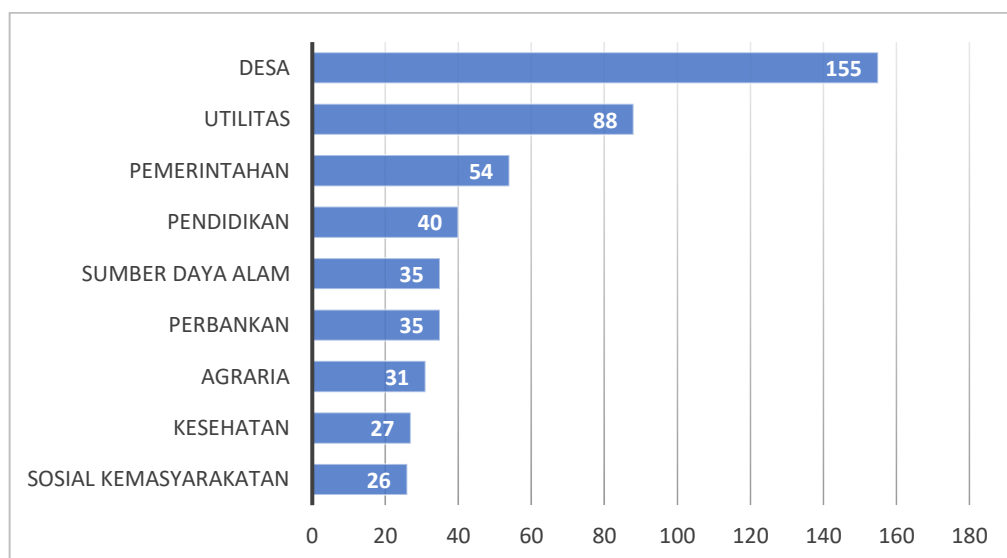
Sumber : Kementrian Keuangan, diolah

Berdasar pada grafik 1.2 dapat dijelaskan bahwa besaran anggaran dana desa pada tiap wilayah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan jumlah yang cukup besar. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pemerintah

sangat berupaya dalam melakukan percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Peningkatan alokasi dana desa diharapkan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pengalokasian dana desa mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan, serta berdasar pada formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis. Secara umum Kabupaten Brebes mendapatkan alokasi dana desa paling besar selama rentang waktu 2015 hingga 2021. Sementara itu, Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi dana desa paling kecil di antara semua kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Kamaruddin et al. (2022) menjelaskan tentang alokasi dana desa yang digunakan untuk membangun fasilitas umum untuk mendukung kebutuhan masyarakat desa. Ini membantu mengurangi beban sistem swadaya masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terbebani oleh program swadaya sehingga mampu melakukan perbaikan ataupun melakukan pembangunan fasilitas umum, seperti melakukan perbaikan atau pembangunan jalan sampai perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang ada di desa. Ini adalah salah satu dampak dari penerapan otonomi daerah dengan pemeberian dana desa dari pemerintah pusat.

Grafik 1. 3 Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Tahun 2022



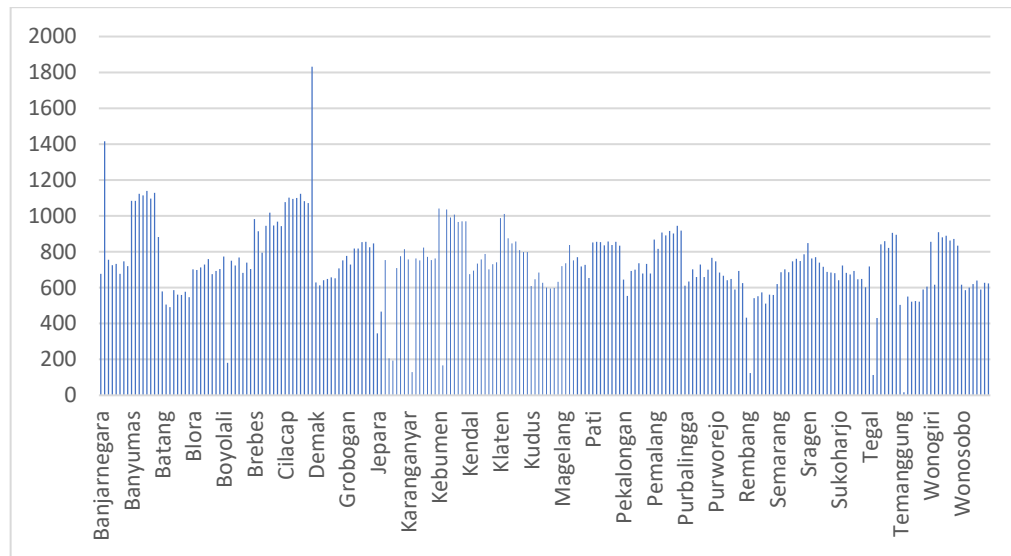
Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Berdasar pada grafik 4. dijabarkan mengenai dana desa sebagai sektor dengan kasus korupsi tertinggi dengan kerugian yang dialami oleh negara mencapai Rp.382 miliar, sekitar 133 kasus korupsi yang terkait dengan pengelolaan dana desa, selanjutnya terdapat 22 kasus korupsi yang terkait dengan penerimaan pada tingkat desa. Di luar lingkungan desa, korupsi juga melibatkan sektor utilitas dengan jumlah mencapai 88 kasus. Sektor pemerintahan menempati peringkat berikutnya dengan 54 kasus korupsi. Sektor pendidikan juga tidak luput dari permasalahan ini dengan catatan 40 kasus korupsi pada tahun yang sama. Selain itu, sektor sumber daya alam dan juga perbankan juga mengalami korupsi dengan jumlah kasus yang sama, yaitu sebanyak 35. Di sektor agraria, tercatat sekitar 31 kasus korupsi terjadi pada tahun 2022. Selanjutnya, dalam sektor kesehatan dan sosial kemasyarakatan masing-masing terjadi 27 dan 26 kasus.

Penelitian dari Ch et al. (2023) menemukan bahwa korupsi terhadap dana desa menimbulkan hambatan terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di desa, dimana alokasi dana desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan oleh tindakan korupsi, sehingga dampaknya semakin memperparah kemiskinan yang ada di desa. Diperlukan pengawasan secara maksimal terhadap pengelolaan dana desa guna menghindari terjadinya praktek korupsi. Mengingat dana desa setiap tahunnya meningkat, maka dana desa harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat desa. Sehingga dapat mendorong pembangunan pedesaan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memiliki kemampuan untuk menjalankan kebijakan dana desa dengan cara yang transparan dan akuntabel, dan juga mematuhi rencana yang telah disusun bersama masyarakat dan aparatur desa.

Menurut Ambya (2020) penting untuk memastikan bahwa penggunaan dari dana desa dapat diakses oleh semua warga desa dan bahwa tujuan pemanfaatannya jelas dan dapat diidentifikasi. Selain itu, tingkat transparansi dalam penggunaan dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan di sebuah desa

Grafik 1. 4 Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan Berdasarkan Total Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022



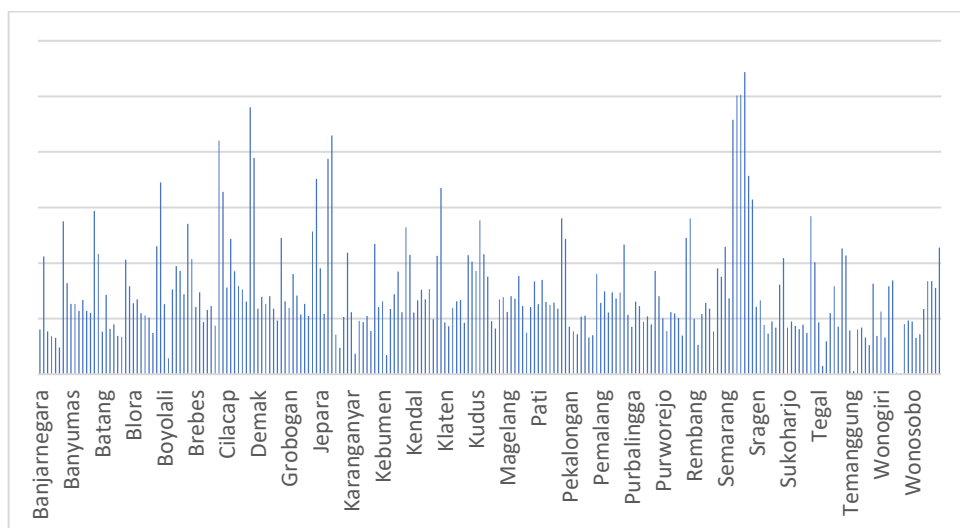
Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 yang isinya Anggaran pendidikan merupakan alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara atau lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk didalamnya adalah gaji pendidik namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Anggaran pendidikan lewat transfer ke daerah adalah alokasi pendidikan yang disalurkan lewat transfer daerah yang merupakan wujud dari otonomi daerah. Pada sektor pendidikan memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Pemerintah telah melaksanakan berbagai macam program pendidikan sebagai upaya dalam menciptakan individu yang memiliki kualitas sehingga nantinya akan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Melalui sektor pendidikan yang berkualitas, para generasi muda yang berkualitas nantinya dapat didorong untuk ikut serta andil melakukan pembangunan yang berkualitas. Dimulai sejak 2009, pemerintah mengalokasikan sekitar 20% dari APBN serta minimal 20% APBD dianggarkan untuk sektor pendidikan. Pada beberapa negara, pengalokasian pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan jauh lebih besar jumlahnya untuk masyarakat miskin. Bisa diambil contoh negara peru, yang mana sekitar 1/6 penegeluaran pemerintah peru dipakai guna mensubsidi

sektor pendidikan. Pada tahun 2005 Haughton melakukan penelitian dan menemukan bahwa pengeluaran pada sektor pendidikan dampaknya sangat progresif dengan presentase pengeluaran lebih besar pada keluarga miskin dibandingkan dengan keluarga kaya (Haughton dan Shahidur, 2012).

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus melakukan penanganan kemsikinan, pada suatu wilayah diperlukan untuk lebih mengetahui apa saja faktor yang nantinya akan mempengaruhinya, salah satunya pengeluaran pemerintah pada fungsi ekonomi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 yang membahas mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan klasifikasi belanja pemerintah menurut fungsi yang digunakan dengan tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, yang dibagi menjadi 9 fungsi, yaitu pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pada pengeluaran pemerintah bidang ekonomi memiliki fungsi dasar dimana fungsi ini menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan dasar dari masyarakat, dilain sisi fungsi ini juga digunakan dalam pemberian subsidi atau menyediakan insfrasruktur yang layak untuk masyarakat.

Grafik 1. 5 Realisasi Belanja Fungsi Ekonomi Berdasarkan Total Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022



Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

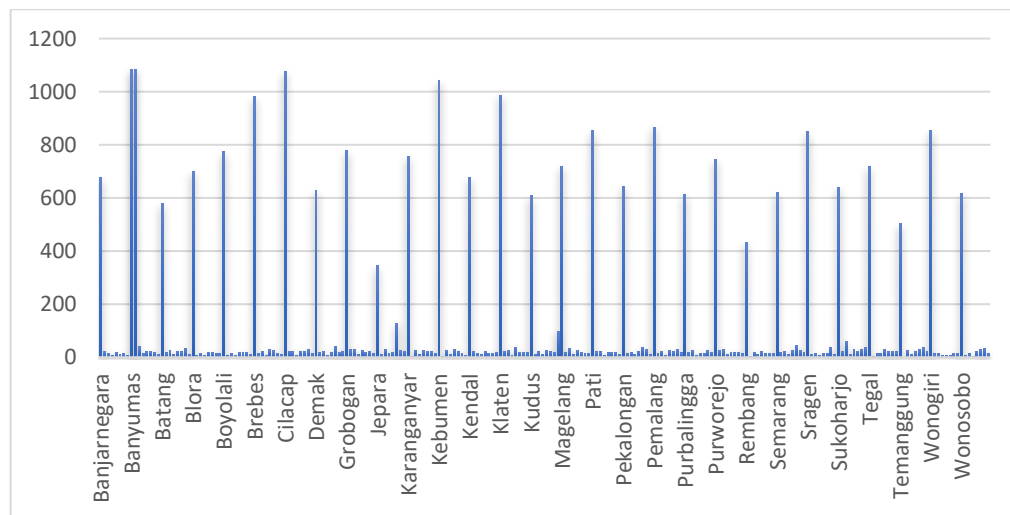
Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan suatu realisasi anggaran yang bermanfaat untuk pembiayaan program sarana dan prasarana pada sektor-sektor diantaranya, pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, pengairan, energi dan bahan bakar, dan juga transportasi, maksud dari pengeluaran ini diharapkan mampu menopang dalam upaya percepatan dalam pertumbuhan ekonomi (Yasinta, 2018). Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 mengenai Klasifikasi Anggaran, yang isinya adalah anggaran yang terdapat pada fungsi ekonomi yang didalamnya terdiri dari perdagangan, perkembangan usaha, koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM), tenaga kerja, pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, pengairan, energi dan bahan bakar, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, telekomunikasi, dan informatika, penelitian serta pengembangan ekonomi, dan juga ekonomi lainnya.

Pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi juga diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang ekonomi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dimana keduanya merupakan beberapa aspek yang termasuk dalam tujuan pembangunan yang sangat mendasar. Dalam upaya mendukung hal tersebut dibutuhkan alokasi anggaran yang tepat. Alokasi anggaran yang tepat nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau dalam kata lain menurunkan tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi didalam penelitian ini terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya.

Kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan menjadi perhatian penting dari pemerintah, beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah menerapkan kebijakan perlindungan sosial, dimana ini merupakan bentuk inisiatif yang baik dari pemerintah, swasta, ataupun masyarakat guna mewujudkan transfer pendapatan maupun konsumsi penduduk miskin, sebagai pelindung untuk kelompok rentan resiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial beberapa kelompok terpinggirkan (Suharto, 2008). Hal ini juga tertuang didalam UUD 1945 tepatnya pada pasal 34 yang isinya bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan

sosial yang bersifat nasional. Perlindungan sosial juga amat berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan (Supriyanto dkk, 2014). Ada beberapa aspek yang tidak akan terpisahkan dari upaya pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta upaya pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara. Tertulis didalam UUD 1945 sebagai sebuah landasan konstitusional mengenai cita-cita luhur bangsa indonesia tentang sistem perlindungan sosial. Didalam pembukaan UUD 1945 tertulis bahwa melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Grafik 1. 6 Realisasi Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Berdasarkan Total Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022



Sumber : Kementrian Keuangan, diolah

Secara langsung perlindungan sosial memberikan dukungan dalam permasalahan kemiskinan, utamanya pada individu yang tergolong dalam masyarakat miskin. Pemerintah berupaya melalui beberapa program yang dianggap mampu membantu masyarakat yang berada pada kemiskinan agar mampu untuk keluar dari kondisi yang sulit sekarang ini dan mencegah terjadinya akrentanan sosial ekonomi yang bisa mengakibatkan terjerumus kedalam garis kemiskinan (Putri & Putri, 2021). Pengeluaran dalam bidang perlindungan sosial ini juga dapat menjadi bumerang untuk pemerintahan. Karena fakta dalam belanja perlindungan sosial sendiri rawan untuk diselewengkan, ini sangat terkait dengan penganggaran, pelaksanaan, dan akuntabilitas, serta tidak adanya batasan pasti dalam pembelanjaan. Beberapa data rumah tangga berpendapatan rendah tidak benar, penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) tidak tepat sasaran, keluarga berpendapatan

rendah tidak mampu mengajukan proposal, tidak dapat mematuhi peraturan, dan tidak menerima bantuan secara utuh (Akba, 2018).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dan menjadikan masyarakat yang bebas dari belenggu kemiskinan. Dari beberapa teori serta penelitian yang dilakukan dan dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka dari itu penelitian ini membahas mengenai pengaruh dana desa, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, ekonomi dan perlindungan sosial terhadap kemiskinan. Penelitian ini diberi judul “Pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, maka dapat diuraikan permasalahan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2015-2022?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan terhadap Kemiskian di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2015-2022?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2015-2022?
4. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2015-2022?

2.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang tertulis diatas, maka peneltian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Melakukan analisis pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2015-2022.
2. Melakukan analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2015-2022.

3. Melakukan analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2015-2022.
4. Melakukan analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2015-2022.

2.3 Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini merupakan salah satu persyaratan guna meraih gelar sarjana strata 1 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan gambaran mengenai bagaimana pentingnya pengaruh dari dana desa, pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang perlindungan sosial terhadap kemiskinan, dan juga sebagai wujud sekaligus wadah dari penerapan serta analisis dari teori yang dipelajari selama perkuliahan dalam konteks ekonomi.

Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian pustaka untuk para peneliti selanjutnya dan menjadi salah satu acuan pada penelitian selanjutnya yang dilakukan para akademisi lainnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu membantu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memustuskan bahan pertimbangan kebijakan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan berdasarkan pada variabel terkait.

2.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan dijelaskan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan tentang penguraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bagian ini diuraikan beberapa penelitian sebelumnya, pemaparan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis penelitian juga disaikan dalam bagian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian baik mulai dari jenis maupun metode dalam pengumpulan data, menjelaskan tentang definisi operasional variabel dalam penelitian, dan juga beberapa metode dan pendekatan yang akan dipakai dalam melakukan analisis hasil pengolahan data.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini selanjutnya dipaparkan mengenai hasil dari pengolahan data dan disertai pembahasan serta interpretasi dari pengolahan data.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bagian ini nantinya akan dilakukan pembahasan simpulan dari analisis data yang ada pada bab sebelumnya guna menjawab hipotesis yang sudah disusun, dan juga menjelaskan mengenai implikasi yang terjadi yang berdasar pada hasil pengolahan data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Tujuan dari dibuatnya penelitian skripsi ini merupakan salah satu dari penyempurna beberapa penelitian yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan kekurangan ataupun kelebihan. Lebih dari itu penulis mencoba menggali beberapa informasi yang bersumber dari buku, jurnal ataupun skripsi sebelumnya guna mengetahui teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan dalam menyusun teori ilmiah. Penulis telah mengutip referensi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut.

Handayani et al (2022) melakukan penelitian dengan judul “The Effectiveness of Local Government Spending on Poverty Rate Reduction in Central Java, Indonesia”. Tujuannya melakukan analisis mengenai pengaruh belanja daerah menurut pada fungsi, diantaranya fungsi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ekonomi, dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* dengan sumber data dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan tahun 2015-2019. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa belanja fungsi ekonomi dan infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap presentase kemiskinan.

Arfiansyah (2020) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah”. Tujuannya melakukan analisis mengenai pengaruh dana desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2015-2019. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* dengan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan juga Kementerian Keuangan. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa variabel dana desa dan produk domestik bruto memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

Sigit & Kosasih (2020) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan di Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia”. Tujuannya melakukan analisis dari pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia, variabel yang digunakan diantaranya dana desa, PDRB, dan belanja modal APBD Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* dengan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Ditjen Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik periode 2015-2017. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel dana desa, alokasi dana desa, dan PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan pada variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Azwardi (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Indonesia untuk Fungsi Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, serta Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Penduduk Miskin Tahun 2011-2013”. Tujuannya melakukan analisis dari pengaruh pengeluaran pemerintah pada fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan, perumahan dan fasilitas umum terhadap kemiskinan di provinsi seluruh indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* dengan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kementrian Keuangan dan Badan Pusat Statistik periode 2011-2013 mencakup 33 provinsi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel fungsi ekonomi dan kesehatan berpengaruh positif terhadap penduduk miskin, sedangkan fungsi pendidikan dan fungsi perumahan dan fasilitas umum berpengaruh negatif terhadap penduduk miskin.

Swandriano & Arif (2023) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kudus”. Tujuannya melakukan analisis mengenai pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH), Dana Desa (DD), dan Program Indonesia Pintar (PIP), terhadap kemiskinan pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kudus periode tahun 2018-2021. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan *Random Effect Model* dengan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari Kementrian Desa, Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Variabel Dana Desa dan Program Indonesia Pintar memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel Program Keluarga Harapan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan.

Safitri (2021) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Penurunan Jumlah Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Jember)”. Tujuannya melakukan analisis dari pengaruh antara dana desa, alokasi dana desa dan akses fasilitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan terhadap penurunan jumlah kemiskinan di Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* dengan sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa periode 2015-2019. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel dana desa memiliki pengaruh signifikan positif terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan variabel alokasi dana desa, variabel akses dasar pelayanan pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa tidak semua jenis dari variabel independen penelitian yang dipilih memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang lainnya dan juga dengan penelitian ini. Pada penelitian ini didasarkan pada lokasi, tahun, dan variabel independen yang terlibat. Variabel terikat yang terdapat pada penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin yang ada pada 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ada juga variabel bebas yang terdapat pada penelitian ini diantaranya ada dana desa, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial. Dengan pemilihan variabel tersebut diharapkan mampu menunjukkan bahwa variabel bebas yang sudah dipilih memiliki dampak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

2.2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, kemiskinan memiliki arti suatu kondisi atau keadaan dari ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan pokok baik pangan maupun non pangan, yang diukur berdasarkan pengeluaran. Jika diartikan penduduk miskin adalah sekelompok penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita perbulan berada dibawah garis kemiskinan. Dalam pengertian lain kemiskinan juga dapat diartikan suatu kondisi dimana seseorang maupun kelompok orang yang dimana tidak mampu dalam memenuhi hak-haknya. Mengenai hak-hak ini dipaparkan oleh Bappenas (2018) mengenai hak-hak tersebut yang mana diantaranya adalah mampu terpenuhinya kebutuhan mulai pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam lingkungan hidup, rasa aman, ancaman tindak kekerasan, dan juga hak dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun politik.

Dijelaskan juga kemiskinan atau *Poverty* merupakan suatu istilah yang menyatakan dimana tidak adanya kemakmuran hidup serta tidak adanya persediaan kebutuhanpun juga tidak sebanding. Pendefinisian istilah ini merupakan suatu titik dimana kehilangan dalam pemeliharaan efisiensi fisik, atau pendefinisian dalam ekonomi yaitu suatu keadaan ekonomi yang mana adanya keterbatasan peluang atau kesempatan yang dimiliki suatu kelompok dalam upaya mengakses sumber daya pembangunan. Mengenai permasalahan kemiskinan, bukan saja hanya dialami oleh negara berkembang saja, namun di negara maju juga kemiskinan masih menjadi suatu momok yang pelik untuk diselesaikan. Menurut Mafahir dan Soelistiyo (2017), terdapat empat pola kemiskinan. Pertama, *persistent poverty* merupakan kemiskinan kronis atau kemiskinan turun temurun. Kedua, *cyclical poverty* merupakan kemiskinan dengan mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Ketiga, *seasonal poverty* merupakan kemiskinan yang terjadi musiman, kemiskinan ini sering menimpa petani dan nelayan. Keempat, *accidental poverty* merupakan kemiskinan yang terjadi akibat terjadinya bencana alam, sehingga hal ini menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan.

2.2.1.2 Teori Kemiskinan

Telah disampaikan oleh Suharto (2009), terdapat dua teori besar yang sering digunakan dalam memahami kemiskinan, yakni teori neo-liberal dan teori demokrasi-sosial.

1. Teori Neo-Liberal

Pada teori ini, individu dan kekuatan pasar merupakan fokus utama dalam mengamati kemiskinan. Pendapat ini memberikan penjelasan masyarakat miskin dianggap miskin dikarenakan memiliki beberapa kekurangan dan/atau keputusan yang dibuat oleh individu. Pada pendapat ini, solusi utama terhadap permasalahan kemiskinan dilateakkan pada pengaruh kekuatan pasar. Pengentasan kemiskinan terjadi apabila adanya kekuatan pasar yang semakin besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Penjelasan dari perspektif ini yaitu bahwa kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan itu sifatnya sementara, dan peran negara hanya sedikit. Peran negara muncul dan dirasakan ketika lembaga-lembaga kemasyarakatan, termasuk keluarga, kelompok swadaya, dan organisasi lainnya, tidak mampu mengatasi kemiskinan secara efektif (Suharto, 2009).

2. Teori Demokrasi Sosial

Teori yang ini berpandangan bahwa kemiskinan tidak boleh dilihat hanya sebagai permasalahan individual, namun juga dilihat sebagai permasalahan struktural. Ketidakadilan dan kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat menimbulkan kemiskinan, karena menghambat akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber daya penting yang diperlukan. Pandangan ini memberikan kritik terhadap keyakinan bahwa kemiskinan dan ketidakadilan sosial dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pandangan ini tidak menganjurkan dengan melakukan penghapusan sistem kapitalis, karena sistem kapitalis tetap dianggap sebagai cara organisasi ekonomi yang paling efisien. Pandangan ini juga menggarisbawahi pentingnya kesetaraan untuk mencapai kemandirian dan kebebasan. Pendapat ini menunjukkan pentingnya mengatasi masalah kemiskinan secara institusional (melembaga) dengan

tata kelola yang efektif dan alokasi keuangan dalam memfasilitasi penyediaan layanan sosial mendasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial, kepada seluruh lapisan masyarakat (Suharto, 2009).

Pandangan ini berpendapat bahwa yang merupakan penyebab utama kemiskinan tidak semata-mata disebabkan dari kemampuan individu, namun lebih pada cara struktur dan institusi menjamin kesempatan yang sama bagi semua masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kebebasan. Terdapat perbedaan yang jelas antara kedua pandangan tersebut dalam hal perspektif mengenai kemiskinan dan pendekatan dalam mengatasi permasalahan terkait kemiskinan.

2.2.1.3 Penyebab Kemiskinan

Berdasarkan identifikasi Kuncoro (1997), terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan dari perspektif ekonomi. Diantaranya sebagai berikut.

- a. Pada tingkat mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksetaraan dalam kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Masyarakat miskin memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah.
- b. Kemiskinan terjadi akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas rendah pada sumber daya manusianya berarti rendah juga produktivitas, yang pada akhirnya menghasilkan upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, tingkat keberuntungan yang kurang baik, adanya diskriminasi, atau keturunan.
- c. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses terhadap modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini ada kaitannya dengan konsep lingkaran setan kemiskinan. Ketertinggalan, ketidaksempurnaan pasar, dan kekurangan modal mengakibatkan produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah berdampak pada pendapatan yang rendah, yang pada gilirannya mengakibatkan tabungan dan investasi yang minim. Rendahnya tingkat investasi berkontribusi pada kurangnya pembangunan, dan seterusnya.

2.2.1.4 Klasifikasi Kemiskinan

Kemiskinan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut.

1. Kemiskinan Absolute

Kemiskinan absolut mengacu pada kondisi dimana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk standar hidup minimal. Kebutuhan ini mencakup unsur-unsur penting seperti makanan, pakaian, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Dalam hal ini, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai jumlah rata-rata yang dibelanjakan atau dikonsumsi untuk kebutuhan dasar untuk memenuhi standar kesejahteraan (Suryawati dalam Jacobus et al., 2019). Kemiskinan absolut inilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan salah satu kemiskinan yang disebabkan oleh tidak mampunya kebijakan pembangunan menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga mengakibatkan distribusi pendapatan tidak merata. Kemiskinan relatif sangat bergantung pada distribusi pendapatan, sehingga kemiskinan relatif tidak dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang serupa (Wahyu, 2009).

3. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi akibat keadaan alam dan geografis yang tidak kondusif bagi kesejahteraan manusia, seperti kondisi alam yang kering dan tidak teratur, kelangkaan sumber daya alam, atau letak geografis yang terisolasi (Bappenas, 2018).

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural mengacu pada keadaan di mana suatu kelompok masyarakat tidak dapat merata mengakses sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas karena struktur sosial yang tidak mendukung distribusi pendapatan yang adil. Kemiskinan jenis ini terjadi ketika penduduk suatu wilayah tidak memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang tersedia karena wilayah

tersebut tidak mempunyai pelayanan dan infrastruktur yang diperlukan untuk menopang kehidupan masyarakat (Aima dalam Daniel et al., 2021).

5. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada pola pikir dan cara hidup yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok, yang diakibatkan oleh gaya hidup dan latar belakang budaya mereka, di mana mereka terus-menerus merasakan ketidakcukupan dan kekurangan. Pengelompokan masyarakat seperti ini menunjukkan keengganan untuk terlibat aktif dalam inisiatif pembangunan dan menunjukkan kurangnya motivasi untuk meningkatkan dan mengubah kualitas hidup mereka. Akibatnya, tingkat pendapatan mereka dianggap rendah berdasarkan ukuran yang umum digunakan (Djaenal et al., 2021).

2.2.2 Pengeluaran Pemerintah

2.2.2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah oleh Musgrave dan Rostow

Musgrave dan Rostow Merupakan penggagas teori pengeluaran pemerintah yang dikenal juga sebagai teori pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Dalam konteks ini, mereka membangun hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi (Witta et al., 2023). Pada tahap awal pembangunan, rasio investasi pemerintah jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi secara keseluruhan. Pada tahap ini, kewajiban utama pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kemajuan, mencakup bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi, dan sektor lainnya. Pada tahap ini, pemerintah fokus melakukan upaya signifikan untuk membangun landasan yang kuat bagi ekspansi ekonomi. Hal ini mencakup jaminan aksesibilitas infrastruktur penting yang mendorong kemajuan masyarakat dan sektor ekonomi.

Pada tahap pertengahan, terdapat peningkatan dalam laju pertumbuhan investasi swasta. Namun, investasi pemerintah tetap menjadi kebutuhan yang krusial. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai masalah dalam perekonomian selama fase ini, seperti kegagalan pasar. Permasalahan tersebut merupakan

hambatan besar yang tidak dapat diatasi sepenuhnya oleh sektor swasta, sehingga memerlukan intervensi pemerintah untuk mengatasi dan menyelaraskan dinamika perekonomian.

Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjutan pembangunan ekonomi, terdapat transisi prioritas pemerintah dari investasi infrastruktur menjadi pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Program-program ini mencakup bantuan untuk lansia, layanan medis, bantuan ekonomi, dan bidang terkait lainnya. Transformasi ini menandakan semakin besarnya keterlibatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, mengalihkan fokus dari aspek fisik dan struktural menuju upaya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara komprehensif.

2.2.2.2 Hukum Wagner (*Wagner's Law*)

Hukum Wagner menyatakan bahwa seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu daerah, maka tingkat keterlibatan dan pengeluaran pemerintah juga akan meningkat (Solikin, 2018). Pengeluaran pembangunan untuk kegiatan pemerintahan terus mengalami peningkatan, yang oleh Wagner disebut sebagai "law of everincreasing state activities" atau yang dikenal oleh Musgrave sebagai "law of growing public expenditures". Peningkatan ini terfokus pada kegiatan dan kebutuhan pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah melalui pengeluarannya. Hukum Wagner mencerminkan bahwa semakin intensif kegiatan pemerintah, walaupun kebutuhan pemerintah meningkat, pengeluaran negara juga akan meningkat (Jaelani, 2018). Asumsi dasar dari Hukum Wagner adalah bahwa dalam suatu perekonomian, ketika pendapatan per kapita meningkat maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat.

2.2.2.3 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal mengacu pada konteks otonomi daerah di Indonesia, yakni pengalihan kewenangan dan tanggung jawab keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal mencakup pengalokasian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah,

dengan tujuan mencapai stabilitas fiskal yang berkelanjutan dan mendorong kegiatan perekonomian masyarakat. Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah untuk memastikan alokasi sumber daya keuangan yang adil di berbagai daerah, sesuai dengan tingkat otonomi yang diberikan kepada masing-masing daerah otonom dalam mengelola kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah, khususnya di bidang fiskal, dengan memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat daerah sehingga terciptanya pemerataan penggunaan dana publik dan meningkatkan kapasitas pembangunan di tingkat daerah (Mega Christia & Ispriyarso, 2019).

2.2.3 Dana Desa

2.2.3.1 Pengertian Dana Desa

Secara pengertian Dana Desa merupakan suatu dana yang bersumber dari anggaran dan belanja negara atau APBN, yang peruntukannya untuk desa yang disalurkan melalui proses tranfer APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten dan selanjutnya digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, serta kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, ini sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014.

Undang-undang mengenai desa juga telah menempatkan desa menjadi ujung tombak didalam pembangunan dan upaya peningkatan masyarakat. Suatu desa diberikan kewenangan serta sumber dana yang memadai agar mampu dalam mengelola potensi yang ada pada desa tersebut yang nantinya berguna dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran dana desa yang disalurkan kepada tiap desa dari pemerintah pusat dalam kurun waktu satu tahun jumlah dananya cukup besar.

Dari dana yang besar itulah dibutuhkan juga pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat, hal yang bisa dilakukan adalah melibatkan masyarakat

secara aktif dalam melakukan kegiatan dengan cara membuat perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa itu sendiri. Misalnya, dengan melakukan kegiatan gotong royong dalam melakukan suatu pembangunan, dengan adanya kegiatan gotong royong yang demikian diharapkan mampu mempererat persaudaraan dan kebersamaan, selain itu juga masyarakat juga bisa mengawasi proses pembangunan karena secara aktif mengetahui keluar masuknya uang yang digunakan pembangunan agar tidak terjadi pembengkakan yang tidak masuk akal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai alokasi anggaran untuk desa disusun dengan maksud tujuan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan. Pemerataan dilakukan dengan melalui Alokasi Dasar, dan keadilan dicapai dengan melalui Alokasi Formula, yang dalam hal ini mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis tiap desa. Kebijakan Dana Desa ini juga merupakan bentuk dari implementasi Nawacita, lebih tepatnya pada cita ketiga, untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus dari kebijakan ini yaitu berupaya dalam mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antardesa, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Dalam penerapan dari pelaksanaan peraturan undang-undang desa dengan baik, dibutuhkan sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan. Ini bertujuan dalam mengembangkan indikator pengelolaan, diantaranya keterbukaan dalam penggunaan dana desa, pertanggungjawaban mengenai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan, dan juga tingkat keberhasilan yang efisien dalam mencapai tujuan. Proses ini dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak guna menguatkan fungsi dan kerjasama baik dalam merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, melakukan pemantauan serta melakukan evaluasi dalam merancang keputusan bersama, diantara yang terlibat adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, dan juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.

2.2.3.2 Sumber Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang isinya menyatakan bahwa Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tercantum juga didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018, tentang Pengelolaan Dana Desa, yang isinya menyatakan bahwa pengalokasian Dana Desa dilakukan secara berkeadilan dan merata berdasarkan tiga kriteria utama, yakni alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formulasi.

Dalam Pagu Alokasi Dasar perhitungan sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi merata kepada setiap desa. Dalam Pagu Alokasi Afirmasi sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Dalam Pagu Alokasi Formula sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, masing-masing dengan bobot 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk, 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan, 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah, dan 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Sumber Dana Desa juga tercantum didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 2, yang isinya adalah pemerintah memberikan mandat untuk mengalokasikan dana desa yang dianggarkan APBN sebagai suatu hasil pendapatan desa. Adapun mengenai penjabaran awal mula hasil pendapatan dana desa adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana yang bersumber dari APBN
3. Merupakan bagian dari hasil PDRD atau Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota
5. Merupakan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota

6. Hibah serta sumbangan dari pihak ketiga
7. Atau merupakan pendapatan desa yang sah

2.2.3.3 Tujuan Dana Desa

Penjelasan dari Kemetrian Keuangan (2017), bahwa Dana Desa mempunyai lima tujuan utama. Yang pertama, merupakan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah desa. Yang kedua, mengarahkan Dana Desa untuk memberikan kontribusi dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan. Yang ketiga, bertujuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat desa. Yang keempat, tujuan dari Dana Desa adalah mengurangi kesenjangan pembangunan yang terjadi antar wilayah desa. Terakhir, yang kelima, Dana Desa diorientasikan dalam upaya memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek utama dalam proses pembangunan.

Dijelaskan pada Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 6 Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Tujuan dari adanya dana desa adalah sebagai bentuk dukungan pembiayaan pelaksanaan tugas dari pemerintahan desa dalam melakukan pembangunan, pembinaan terhadap masyarakat, serta juga pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dari dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, mengenai anggaran dan belanja desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa (MusDes). Hasil dari Musyawarah Desa harus dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan APBDesa, rencana kerja pemerintah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa. Desa diberikan hak dalam mengelola sumber daya dan potensi yang ada dengan maksud meningkatkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Melalui alokasi anggaran dana desa, desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan perekonomian masyarakatnya, seperti melalui pelatihan dan pemasaran produk lokal, perluasan usaha peternakan, pertanian, atau perkebunan, pengembangan sektor pariwisata, serta pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.2.4 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan tentang sistem pendidikan, yang maksudnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tujuan dari pendidikan yaitu upaya mengembangkan potensi dari peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi pribadi yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, cakap, sehat, berilmu, mandiri, kreatif, dan menjadi sosok warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Bidang pendidikan merupakan bidang yang fokus utamanya pada individu manusia, yang secara langsung memberikan dampak kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, dengan meningkatkan keterampilan dan kapabilitas setiap individunya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), besaran dana yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor bidang pendidikan merujuk pada alokasi belanja pemerintah untuk pendidikan, termasuk didalamnya ada gaji, yang minimal mencapai 20 % (duapuluh persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Ini berlaku juga pada tingkat daerah, yang mana alokasi minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pendidikan. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan merupakan bukti nyata pada investasi SDM (*human capital invesment*) dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan produktivitas masyarakat secara berkelanjutan. Bila diamati lebih lanjut, sektor pendidikan merupakan sektor dengan alokasi dana terbesar jika dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Karena dalam hal ini tujuan utama dari alokasi dana pendidikan adalah meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, yang dalam cakupannya termasuk penambahan tenaga pendidikan. Menurut Wahyudi (2020), Tujuan utama pengeluaran sektor pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang nantinya juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga berpengaruh langsung terhadap proses pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Sektor pendidikan merupakan pemegang peranan terpenting dan sangat strategis dalam usaha untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable development*) yang dapat mendukung proses produksi ataupun aktivitas ekonomi yang lainnya. Pendidikan merupakan alat dalam mencapai target berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas-aktivitas pembanguna akan dapat tercapai, yang selanjutnya terdapat peluang untuk meningktkan kualitas hidup yang lebih baik dimasa mendatang. Menurut Todaro & Smith (2015), pendidikan merupakan tujuan pokok pembangunan. Dalam hal ini pendidikan memainkan peran penting dalam kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas untuk pertumbuhan dan pembangunan yang lebih mandiri. Pendidikan dimasukkan sebagai input dalam fungsi produksi agregat karena dianggap sebagai komponen penting pertumbuhan dan pembangunan. Sebab kemajuan suatu bangsa atau negara dapat diukur dari tingkat pendidikan masyarakatnya (Palenewen, 2018).

2.2.5 Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi

Pengeluaran pemerintah memiliki pengertian yaitu semua kegiatan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan negara maupun daerah dalam

rangka menjalankan fungsinya (Idris, 2016). Secara garis besar pengeluaran pemerintah dibagi sebagai berikut.

- a. Pengeluaran investasi, tujuan dari pengeluaran ini adalah untuk menambah kekuatan serta ketahanan ekonomi pada masa depan.
- b. Pengeluaran langsung, pengeluaran ini merupakan pengeluaran yang dalam pengalokasiannya secara langsung dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
- c. Pengeluaran dengan tujuan penghematan pengeluaran dimasa mendatang.
- d. Selanjutnya, pengeluaran dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk fungsi ekonomi yang berguna dalam menciptakan lapangan kerja, dan juga pembangunan sarana dan prasarana umum, yang nantinya akan memicu peningkatan perekonomian di masyarakat. Pengeluaran ini mempunyai tujuan untuk berpengaruh secara langsung pada kesejahteraan masyarakat secara *multiplier effect* (Azwardi, 2014). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan, ini merupakan peran penting dari pemerintah dalam menggerakkan roda pemerintahan. Pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018, mengenai klasifikasi subfungsi dalam pengeluaran fungsi ekonomi yaitu sebagai berikut.

- i. Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- ii. Tenaga Kerja
- iii. Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
- iv. Pengairan
- v. Bahan Bakar dan Energi
- vi. Pertambangan
- vii. Industri dan Konstruksi
- viii. Transportasi

- ix. Telekomunikasi dan Informatika
- x. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi
- xi. Dan, Ekonomi Lainnya

2.2.6 Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan segala bentuk upaya yang ditujukan untuk melakukan pencegahan atau menangani semua bentuk resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 14 ayat 1 menerangkan bahwa perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial yang dimaksud dalam ayat 1 adalah sebagai berikut.

- a. Bantuan sosial
- b. Advokasi sosial
- c. Bantuan hukum

Menurut Bappenas (2020), perlindungan sosial yang dikeluarkan pemerintah mencakup total anggaran yang disalurkan pemerintah untuk jaminan kesehatan melalui jaminan sosial yang sumbernya dari APBN. Disamping itu, terdapat total anggaran yang disalurkan pemerintah untuk bantuan sosial yang bersumber dari APBN. Bantuan sosial yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non Tunai, Program Indonesia Pintar (PIP), Raskin atau Raskin, dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Menurut Suharto (2015), menjelaskan bahwa kebijakan perlindungan sosial merupakan serangkaian komponen dari kebijakan makroekonomi, program ketenagakerjaan, serta kebijakan pendidikan dan kesehatan yang lebih luas. Tujuan dari kebijakan perlindungan sosial adalah untuk mengurangi risiko dan deprivasi, serta mendorong pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Dalam kondisi yang demikian, tidak hanya memungkinkan kelompok "miskin aktif" berpartisipasi lebih produktif dalam kegiatan perekonomian, akan tetapi juga memungkinkan

"kelompok miskin yang kurang aktif" memberikan kontribusi pada stabilitas sosial. Hal ini secara keseluruhan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

2.3 Hubungan antara Variabel Dependen dan Independen

2.3.1 Hubungan antara Dana Desa dengan Kemiskinan

Dana desa diarahkan dalam pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mendorong masyarakat miskin untuk memutus roda kemiskinan. Beberapa pemanfaatan dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa, misalnya perbaikan infrastruktur dasar desa yang didalamnya terdapat pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas air bersih. Sehingga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan mobilitas, memberikan fasilitas munculnya prospek ekonomi baru, dan pada akhirnya nanti membantu mengurangi jumlah penduduk miskin.

Penggunaan dana desa merupakan salah satu upaya pembinaan dari pemerintah untuk masyarakat desa dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan pembinaan masyarakat yang dilakukan seperti penyuluhan kesehatan, implementasi hunian sehat, dan program-program pembinaan lainnya. Lewat alokasi dana desa, pembinaan ini memiliki dampak positif dalam usaha mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat miskin sehingga membawa mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan dana desa berdampak pada berkurangnya masyarakat miskin. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui dana desa memiliki cakupan berupa pemberian akses dan pengembangan potensi yang ada pada desa dan masyarakatnya, tujuan akhirnya adalah mampu menghasilkan produk ataupun karya yang dapat meningkatkan kapasitas desa dan juga dapat mengembangkan sektor ekonomi lokal, misalnya seperti sektor pertanian, perikanan dan peternakan, dapat juga berupa kerajinan tangan, serta juga sektor wisatanya. Melalui kebijakan pemberdayaan seperti ini, diharapkan terdapat peningkatan keterampilan dan kemampuan masyarakat dan juga pengoptimalan

potensi yang ada, sehingga dapat memberikan jalan keluar dari jeratan kondisi kemiskinan (Arfiansyah, 2020).

2.3.2 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Kemiskinan

Pendidikan secara umum dapat dikatakan sebagai investasi pada SDM (Sumber Daya Manusia). Dengan adanya pendidikan akan didapatkan sumbangan besar dalam perkembangan kehidupan sosial ekonomi pada SDM tersebut, melalui tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap serta produktivitas SDM yang semakin mengalami peningkatan. Adanya pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan menjadikan hal tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah melakukan suatu investasi pada sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur peningkatan pada kualitas sumber daya manusia. Bantuan pemerintah pada bidang pendidikan menyokong semua kalangan masyarakat, dalam hal ini khususnya masyarakat miskin yang diharapkan mendapatkan pendidikan layak dan juga memadai. Adanya investasi yang dilakukan pada bidang pendidikan diharapkan mampu memberikan kesempatan pendidikan yang merata kepada seluruh masyarakat sampai bisa memajukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan tersebut (Nasution et al., 2021)

2.3.3 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dengan Kemiskinan

Pengeluaran pemerintah yang berupa anggaran belanja merupakan investasi yang sangat diidamkan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini pengeluaran pemerintah pada fungsi ekonomi merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana transportasi, pertanian, pengairan dan energi yang harapannya mampu mendukung dan usaha percepatan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi adalah investasi yang dilakukan pemerintah dikarenakan pengeluaran pemerintah pada fungsi ekonomi ini terdiri dari anggaran belanja yang diperuntukan dalam pembangunan fasilitas sarana prasarana seperti diantaranya sekolah, jalan, irigasi, rumah sakit, pemberian beasiswa, subsidi serta bantuan untuk korban bencana alam dimana ini bukan termasuk dalam belanja pemerintah pada produk nasional dikarenakan hal ini guna sebagai pembelian barang dan juga jasa (Sukirno,

2015). Dengan adanya pengeluaran pada bidang ekonomi diharapkan akan mampu mendorong produktifitas masyarakat dan mendorong adanya pergerakan pertumbuhan ekonomi sebagai wujud dari upaya pengentasan kemiskinan.

2.3.4 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial dengan Kemiskinan

Perlindungan sosial merupakan salah satu bagian terpenting dari penanggulangan kemiskinan. Menurut Internasional Labour Organization (ILO), mereka menjelaskan bahwa perlindungan sosial memiliki tujuan yakni memberikan jaminan kesejahteraan pendapatan, pelayanan sosial, perlindungan, dan pemberdayaan kepada seluruh masyarakat melalui perhatian khusus masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan. Perlindungan sosial ditujukan bagi semua masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak kebutuhan hidup dasar yang layak. Menurut Sinaga et al. (2022) yang menjadi tujuan utama dari perlindungan sosial adalah guna menjamin kesejahteraan individu dengan memberikan dukungan terhadap pendapatan dan konsumsi mereka, selama masa sulit seperti terjadinya wabah penyakit, pengangguran, atau kecacatan. Disamping itu juga, perlindungan sosial juga memiliki tujuan dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan memastikan akses yang adil terhadap kebutuhan-kebutuhan mendasar. Dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan sosial maka masyarakat dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik terhadap berbagai guncangan sosial-ekonomi, sehingga terwujudnya penurunan angka kemiskinan.

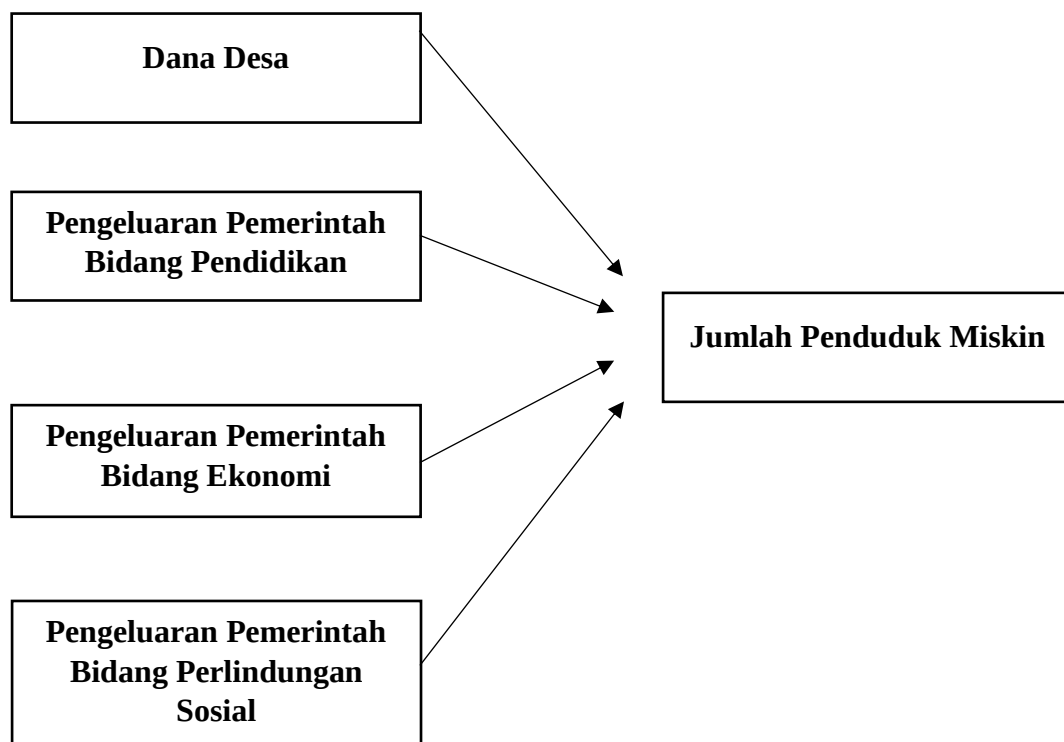
2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut dari penjelasan Bank Dunia yang menjadi salah satu penyebab dari terjadinya kemiskinan adalah karena adanya kekurangan pendapatan dan juga aset dalam pemenuhan kebutuhan dasar misalnya seperti sandang, pangan, ataupun papan dan juga tingkat kesehatan dan pendidikan yang diterima. Dalam memitigasi terjadinya ketidakpastian ekonomi pemerintah berperan penting melalui kebijakan pengeluaran strategis yang disesuaikan dengan dinamika serta kondisi perekonomian. Salah satu bentuk kontribusi yang dilakukan pemerintah adalah melalui pengeluaran pemerintah, misalnya transfer dana desa dan juga alokasi

anggaran sektor publik. Tujuannya tidak hanya sebagai perangsang pertumbuhan ekonomi, akan tetapi langkah ini memiliki dampak tidak langsung dalam upaya penegnatasan kemiskinan (Kemenkeu, 2023).

Sesuai dengan informasi yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai penerapan dana desa menjadi opsi yang paling maksimal dan efektif dalam upaya mengenai pengurangan tingkat kemiskinan di masyarakat. Beberapa solusi lainnya terdapat pada peningkatan alokasi belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan juga sektor kesehatan. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan menjadi kerangka penelitian sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Gambar yang diatas merupakan alur pemikiran penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial terhadap Jumlah Penduduk Miskin di 29 Kabupaten di Jawa Tengah.

2.5 Hipotesis Penelitian

Dengan beberapa pertimbangan atas temuan penelitian terdahulu dan diperkuat berbagai kajian teoritis, maka hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Diduga variabel Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2. Diduga variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh negatif kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
3. Diduga variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
4. Diduga variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian terdapat yang namanya penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Namun, penelitian yang dilakukan saat ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dimana penelitian yang datanya didapatkan dari perhitungan ataupun pengukuran objek dan berbentuk angka-angka. Nantinya jenis datanya merupakan data sekunder, data sekunder sendiri adalah data yang didapatkan dan diolah dari pihak lain yang sudah terpublikasi secara umum dan luas.

Dalam penelitian data yang digunakan merupakan data panel atau data gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Dengan jumlah observasi sebanyak 224, dari data *time series* sebanyak 8 tahun (2015-2022) dan data *cross section* sebanyak 28 kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Beberapa sumber yang dipakai untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian diantaranya, BPS, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta beberapa website dari pemerintah daerah terkait. Data *time series* pada penelitian ini mengacu pada data satu waktu, yakni pada waktu 2015 sampai 2022, sedangkan data *cross section* mencakup seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Maksud dari variabel dalam penelitian adalah semua bentuk yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan nantinya akan diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditariklah kesimpulan secara teoritis, definisi lain dari variabel penelitian ialah atribut dari seseorang maupun objek yang bervariasi antara beberapa individu dengan yang lainnya. Bagian ini menjelaskan mengenai beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini, baik itu variabel dependen ataupun variabel independen.

3.2.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen sendiri memiliki pengertian dimana variabel dari penelitian yang diukur guna mengetahui seberapa besar dampak atau pengaruh dari variabel yang lainnya, bisa juga merupakan variabel yang dihasilkan karena adanya variabel

independen. Didalam penelitian ini, yang merupakan variabel dependen adalah Kemiskinan tahun 2015-2022. Kemiskinan merupakan tingkat penduduk miskin yang terdapat pada masing-masing daerah yang mana dalam penelitian ini terdapat pada kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Nilai variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah ribu jiwa.

3.2.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel dimana variabel ini mempengaruhi variabel dependen. Biasanya variabel ini juga disebut variabel bebas, dimana variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui. Yang menjadi variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah dana desa (X1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X2), Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi (X3), Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial (X4) dari tahun 2015-2022 di Provinsi Jawa Tengah.

a. Dana Desa

Didalam UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dijelaskan bahwa Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang peruntukannya untuk desa dan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pembinaan masyarakat, melaksanakan pembangunan, merupakan beberapa peruntukan dari dana ini. Nilai variabel yang digunakan adalah miliar rupiah.

b. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan merupakan anggaran pendidikan yang terdapat pada APBD tingkat kabupaten/kota pada fungsi pendidikan yang gunanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Adapun nilai variabel yang digunakan adalah miliar rupiah.

c. Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi

Pengeluaran pemerintah sektor ekonomi merupakan anggaran ekonomi yang terdapat pada APBD tingkat kabupaten/kota pada fungsi ekonomi yang gunanya

untuk meningkatkan kualitas ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Adapun nilai variabel yang digunakan adalah miliar rupiah.

d. Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial

Pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial merupakan anggaran perlindungan sosial yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap rakyat, yang terdapat pada APBD tingkat kabupaten/kota pada fungsi perlindungan sosial. Adapun variabel yang digunakan adalah miliar rupiah.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam melakukan penelitian tentunya dibutuhkan yang namanya metode dalam menentukan hasil mana yang terbaik, begitu juga dengan penelitian ini dalam menentukan hasil terbaik dan mampu menjawab tujuan dari penelitian ini digunakan analisis data dengan metode analisis kausalitas atau analisis sebab akibat dimana dalam analisis ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Sedangkan data yang digunakan dalam analisis ini adalah data panel. Didalam ekonometrika, pengolahan data dengan jenis data panel memiliki metode khusus dalam pengolahannya atau sering disebut dengan regresi data panel. Regresi data panel ini juga sedikit berbeda ketika dibandingkan dengan regresi data biasa, alasannya karena regresi data panel ini mengandung 2 informasi sekaligus, yaitu data time series (informasi antar waktu) dan data cross section (informasi antar objek). Analisis data panel ini memakai metode analisis yang dinamakan analisis regresi linier berganda yang mana analisis ini digunakan untuk melihat dari prediksi nilai X1 (Dana Desa), X2 (Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan), X3 (Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi), X4 (Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial) terhadap Y (Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah, sehingga nantinya dapat diketahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) terhadap variabel dependen (Y).

Apabila persamaannya ditulis adalah sebagai berikut:

$$YPOV_{it} = \alpha + LN\beta1DD_{it} + LN\beta2EDU_{it} + LN\beta3ECO_{it} + LN\beta4HLP_{it} + e_{it}$$

Dimana:

YPOV = Kemiskinan

α = Konstanta

DD = Dana Desa

EDU = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

ECO = Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi

HLP = Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial

$\beta 1$ = Koefisien Regresi Dana Desa

$\beta 2$ = Koefisien Regresi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

$\beta 3$ = Koefisien Regresi Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi

$\beta 4$ = Koefisien Regresi Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial

e = Error term

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis yang digunakan adalah statistik parametrik. Dalam pengujiannya setiap variabel harus dilakukan uji normalistanya. Tingkat signifikan (α) yang digunakan adalah 5 % atau 0,05 dalam melakukan pengujian untuk mengetahui hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak atau diterima atau dengan melakukan uji nilai F. dalam hal lain juga dilakukan pengujian terhadap setiap variabel independen secara terpisah pada kemiskinan yakni dilakukan pengujian nilai t. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dalam melakukan pemecahan masalahnya dengan bantuan program komputer Eviews 12.

Penggunaan data panel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan ketika kita menggunakan data time series atau cross section saja (Gujarati, 2013). Keuntungan ketika memakai data panel dijabarkan sebagai berikut ini.

- a. Penggunaan data panel memberikan kita lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, kolinieritas lebih kecil, serta degree of freedom lebih banyak sebab terdiri dari time series dan cross section.

- b. Jika dibandingkan dengan penggunaan data cross section dan time series murni, data panel menghasilkan pengukuran sederhana lebih baik dari dampak yang terjadi antar variabel.
- c. Mempermudah dalam mempelajari model perilaku yang rumit.
- d. Meminimumkan jumlah data yang banyak menjadi bias.

Apabila diamati secara umum didapatkan 2 pendekatan yang digunakan dalam melakukan pendugaan model data panel, yaitu model common effect atau model tanpa pengaruh individu dan model dengan pengaruh individu atau fixed effect dan random effect. Terdapat tiga kemungkinan pendekatan regresi data panel (Sriyana, 2014).

- a. Common Effect Model (CEM), yakni diasumsikan antar individu ataupun antar waktu intersep dan slope tetap baik.
- b. Fixed Effect Model (FEM), yakni diasumsikan intersep antar individu berbeda akan tetapi slope tetap.
- c. Random Effect Model (REM), yakni diasumsikan bahwa slope tetap, akan tetapi baik antar individu maupun antar objek atau waktu intersep berbeda.

Didapati bahwa terdapat tiga kemungkinan model estimasi data panel, selanjutnya tahap yang akan dilakukan adalah pengujian guna melakukan pemilihan model yang terbaik. Penjelasan mengenai bagaimana serta metode apa yang nantinya akan digunakan dalam melakukan pengujian ini, ada 3 pendekatan regresi data panel (Widarjono, 2016).

3.3.1 Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model atau CEM merupakan suatu dugaan antara seluruh data (pooled) time series dan cross section dengan menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau OLS dalam menduga parameternya (Widarjono, 2016). OLS adalah salah satu metode yang populer dalam melakukan pendugaan parameter nilai dalam persamaan regresi linier, OLS tidak melakukan perhitungan dimensi individu atau waktu, hal ini mengasumsikan bahwa perilaku data seseorang sama pada periode waktu yang berbeda. Bentuk persamaan model *common effect* dapat ditulis sebagai berikut.

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + e_{it} \quad (3.1)$$

Keterangan:

$\ln Y_{it}$: log Jumlah Penduduk Miskin

β_0 : Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi X_1, X_2, X_3, X_4

$\ln X_1$: log Dana Desa

$\ln X_2$: log pengeluaran pemerintah bidang pendidikan

$\ln X_3$: log pengeluaran pemerintah bidang ekonomi

$\ln X_4$: log pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial

i : Objek yang digunakan yakni 29 kabupaten

t : Periode waktu yang digunakan sebanyak 8 periode (2015-2022)

e_{it} : *error term* atau residual

3.3.2 Fixed Effect Model (FEM)

Dalam Fixed Effect Model dijelaskan bahwa dalam melakukan estimasi data panel dengan menggunakan dummy variabel untuk menangkap adanya perbedaan intersep (Widarjono, 2016). Atau dalam pengertian yang lain, Fixed Effect Model didasarkan pada adanya perbedaan intersep antar individu akan tetapi terdapat persamaan intersep antar waktu (time in variant). Disisi lain model ini juga mempunyai asumsi bahwa slope atau koefisien regresi tetap baik antar individu ataupun antar waktu. Banyak penyebutan mengenai model pendekatan ini, Fixed Effect Model atau FEM, Least Square Dummy Variabel atau LSDV, dan juga disebut Covariance Model. Jika dituliskan maka bentuk persamaan model *fixed effect* dapat ditulis sebagai berikut.

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + \beta_5 D_{1it} + \dots + \beta_{12} D_{28it} + e_{it} \quad (3.2)$$

Keterangan:

$\ln Y_{it}$	: log Jumlah Penduduk Miskin
β_0	: Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: Koefisien regresi X_1, X_2, X_3, X_4
$\ln X_1$	: log Dana Desa
$\ln X_2$	: log pengeluaran pemerintah bidang pendidikan
$\ln X_3$	: log pengeluaran pemerintah bidang ekonomi
$\ln X_4$	: log pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial
$\beta_5, \beta_6, \dots, \beta_n$	: Intersep dummy setiap kabupaten
$D_1, D_2, \dots, D_{28}$	: Dummy setiap kabupaten, 1 untuk lintas kabupaten yang berpengaruh dan 0 untuk lintas kabupaten yang tidak berpengaruh.
i	: Objek yang digunakan yakni 29 kabupaten
t	: Periode waktu yang digunakan sebanyak 8 periode (2015-2022)
e_{it}	: <i>error term</i> atau residual

3.3.3 Radom Effect Model (REM)

Berbeda dengan Fixed Effect Model yang mempunyai karakteristik individu dan waktu yang diakomodasi intercept dan menyebabkan intercept berubah antar waktu, dalam Random Effect Model atau REM, karakteristik waktu dan individu dibedakan diakomodasikan pada error dari model (Widarjono, 2016). Pada REM random error perlu diurai menjadi error komponen waktu dan error gabungan, karena dalam REM terdapat dua komponen yang berkontribusi ketika pembentukan error. Pada model REM diperhitungkan juga mengenai error yang mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section. Terdapat beberapa penyebutan mengenai model ini, ada yang mengenalnya dengan nama Error Component Model (ECM) atau Generalized Least Squares (GLS). Dalam penulisan bentuk persamaan model *random effect* dapat ditulis sebagai berikut.

$$\ln Y_{it} = \bar{\beta}_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + \beta_5 D_{1it} + \dots + \beta_{12} D_{28it} + (e_{it} + \mu_i) \quad (3.3)$$

Keterangan:

$\ln Y_{it}$	: log Jumlah Penduduk Miskin
$\bar{\beta}_0$	: Rata-rata populasi yang parameternya tidak diketahui
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: Koefisien regresi X_1, X_2, X_3, X_4
$\ln X_1$	: log Dana Desa
$\ln X_2$	: log pengeluaran pemerintah bidang pendidikan
$\ln X_3$	: log pengeluaran pemerintah bidang kesehatan
$\ln X_4$	: log pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial
i	: Objek yang digunakan yakni 29 kabupaten
t	: Periode waktu yang digunakan sebanyak 8 periode (2015-2022)
e_{it}	: variabel gangguan gabungan cross-section dan time series
μ_i	: variabel gangguan berbeda antar individu tetapi sama antar waktu

3.4 Pemilihan Model

Dari pemaparan mengenai model atau teknik estimasi didapati bahwa terdapat tiga alternatif, dalam hal ini diperlukan pemilihan model yang terbaik yang nantinya akan digunakan dalam melakukan estimasi, pemilihan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi penelitian, baik dilihat dari segi jumlah individu dan variable lainnya. Menurut Widarjono (2016), terdapat tiga uji untuk melakukan pemilihan estimasi data panel. Diantaranya, ada Uji F, Uji Langrange Multiplier, dan Uji Hausman. Mengenai penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut.

3.4.1 Uji F

Uji F atau biasa juga disebut dengan nama Uji Chow digunakan dalam menentukan model estimasi terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect*

Model (FEM), penjelasan lebih lanjutnya adalah ketika *Fixed Effect* didapati hasilnya lebih baik dari Common Effect maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan Uji Hausman. Namun apabila didapati hasil dari Common Effect lebih baik hasilnya dari Fixed Effect maka pengujian Uji Hausman tidak perlu dilakukan karena dalam hal ini model Common Effect dianggap paling tepat dipakai dalam melakukan analisis regresi. Jika Uji F dituliskan dalam bentuk rumus maka sebagai berikut.

$$F = \frac{SSR_R - SSR_U / q}{SSR_U / (n - k)} \quad (3.4)$$

Keterangan:

SSR_R : restricted sum squared of residuals

SSR_U : unrestricted sum squared of residuals

q : pembatas dalam model tanpa *dummy*

n : jumlah observasi

k : jumlah parameter estimasi

Berikut hipotesis yang mendasari uji F:

H_0 = *common effect model* lebih tepat dari *fixed effect model*

H_a = *fixed effect model* lebih tepat dari *common effect model*

Dasar dari hipotesis ini adalah melibatkan perbandingan antara nilai F hitung dan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung melebihi nilai F tabel, H_0 akan ditolak, menunjukkan bahwa model yang tepat adalah *fixed effect model*. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, gagal menolak H_0 , dan model yang tepat adalah *common effect model*. Terdapat pertimbangan lain dalam melakukan pengambilan keputusan yaitu melibatkan nilai Probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (satu persen), maka H_0 ditolak, dan menunjukkan *fixed effect model* yang lebih tepat. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (satu persen), maka gagal menolak H_0 , dan *common effect model* menunjukkan model yang lebih tepat.

3.4.2 Uji LM (Langrange Multiplier)

Uji Lagrange Multiplier merupakan pengujian yang dirumuskan oleh Breusch Pagan dan digunakan untuk memilih model estimasi terbaik dengan membandingkan estimasi data panel *random effect model* atau estimasi data panel *common effect model* metode OLS. Dalam pendekatan Breusch Pagan untuk uji signifikansi Random Effect mengandalkan nilai residu yang diperoleh dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Nilai statistik LM diperoleh dengan menggunakan rumus berikut.

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (T\bar{\hat{e}}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2 \quad (3.5)$$

Keterangan:

n = jumlah individu

T = jumlah periode waktu

$\hat{e}$ = residual *common effect* metode (OLS)

Berikut hipotesis yang mendasari uji LM:

H_0 = *common effect model* lebih tepat dari *random effect model*

H_a = *random effect model* lebih tepat dari *common effect model*

Uji LM merupakan pengujian yang menggunakan distribusi chi-squares dengan derajat kebebasan sejumlah variabel bebas. Apabila nilai LM yang didapat lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-squares*, H_0 akan ditolak, menunjukkan bahwa model yang tepat adalah *random effect model*. Namun sebaliknya, jika nilai LM yang didapat lebih kecil dari nilai kritis statistik *chi-squares*, gagal menolak H_0 , dan model yang tepat adalah *common effect model*. Terdapat pertimbangan lain dalam pengambilan keputusan melibatkan nilai Probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (satu persen), maka H_0 ditolak, dan menunjukkan *random effect model* yang lebih tepat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (satu persen), maka gagal menolak H_0 , dan *common effect model* menunjukkan model yang lebih tepat.

3.4.3 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model estimasi terbaik dengan membandingkan random effect model yang berasumsi bahwa terjadi korelasi antara error terms dan variabel independen dengan metode *Generalized Least Squares* (GLS) atau fixed effect model yang berasumsi bahwa tidak terjadi korelasi antara error terms dan variabel independen dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Nilai uji Hausman diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$m = \hat{q} \text{var}(\hat{q})^{-1} \hat{q} \quad (3.6)$$

Keterangan:

m : nilai Chi-squares statistik dari uji Hausman

$\hat{q}$: perbedaan vektor estimator efisien dan tidak efisien

$\text{var}(\hat{q})$: kovarian matriks perbedaan vektor estimator efisien dan tidak efisien

Berikut hipotesis yang mendasari uji Hausman:

H_0 = random effect model lebih tepat dari fixed effect model

H_a = fixed effect model lebih tepat dari random effect model

Dasar pada hipotesis ini melibatkan perbandingan antara Chi-square statistik dan nilai Chi-square kritis yang didapat dari tabel distribusi nilai Chi-square dengan menggunakan *degree of freedom* sejumlah variabel bebas. Apabila Chi-square statistik yang didapat lebih besar dari nilai *chi-squares* kritis, H_0 akan ditolak, menunjukkan bahwa model yang tepat adalah *fixed effect model*. Sebaliknya, jika Chi-square statistik yang didapat lebih kecil dari nilai *chi-squares* kritis, gagal menolak H_0 , dan model yang tepat adalah *random effect model*. Pertimbangan lain dalam pengambilan keputusan melibatkan nilai Probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (satu persen), maka H_0 ditolak, dan menunjukkan *fixed effect model* yang lebih tepat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (satu persen), maka gagal menolak H_0 , dan *random effect model* menunjukkan model yang lebih tepat.

3.5 Pengujian Statistik

Pengujian statistik dilakukan guna menyimpulkan dari penelitian serta melakukan penilaian mengenai sejauh mana hasil regresi mampu mewakili dari kondisi populasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini pengujian statistik mencakup Koefisien Determinasi (R^2), Uji F atau Uji Simultan, dan Uji T (Uji Parsial).

3.5.1 Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur sejauh mana variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Nilai koefisien determinasi (R^2) berkisar antara nol sampai satu. Semakin mendekati nilai satu, hal ini menandakan bahwa variabel bebas yang diikutsertakan dalam model memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan variasi dari variabel terikat. Rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai koefisien determinasi sebagai berikut.

$$R^2 = 1 - \frac{SSR}{TSS} \quad (3.7)$$

Keterangan:

R^2 : Koefisien Regresi

RSS : *Residual Sum of Squares*

TSS : *Total Sum of Squares*

3.5.2 Uji F

Uji simultan merupakan suatu metode uji yang digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama. F hitung dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini.

$$F = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)} \quad (3.8)$$

Keterangan:

ESS : *Explained Sum of Squares*

RSS : *Residual Sum of Squares*

n : Jumlah Observasi

k : Jumlah Parameter Estimasi

Pada pengujian simultan, dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F kritis. Nilai F kritis diperoleh dengan menghitung derajat kebebasan (*degree of freedom*). Pada tabel distribusi F terdapat dua derajat kebebasan, yaitu *degree of freedom denominator* dan *degree of freedom numerator*, yang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

df denominator : $n - k$

df numerator : $k - 1$

Keterangan:

n : Jumlah Observasi

k : Jumlah Parameter Estimasi

Selanjutnya, uji simultan memerlukan pembentukan hipotesis sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Rumusan hipotesis dari uji simultan sebagai berikut.

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari variabel dana desa, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

$H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari variabel dana desa, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

Dalam proses pengambilan keputusan, jika nilai F hitung lebih kecil daripada nilai F kritis, maka keputusan yang diambil gagal menolak hipotesis nul (H_0). Sebaliknya jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F kritis, maka keputusan yang diambil menolak hipotesis nul (H_0).

3.5.3 Uji T atau Uji Parsial

Uji T atau Uji Parsial digunakan untuk mengetahui signifikansi secara individual variabel independen terhadap variabel dependen biasa disebut dengan uji t karena mengacu pada tabel distribusi t. Nilai t-kritis dapat diperoleh dengan menentukan *degree of freedom* menggunakan rumus $df = n - k$, merujuk pada tabel distribusi t berdasarkan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 1% (0.01), 5% (0,05), dan maksimal 10% (0.10). Nilai t-statistik dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini.

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1^*}{se(\hat{\beta}_1)} \quad (3.9)$$

Keterangan:

$\hat{\beta}_1$: Koefisien Regresi

β_1^* : Nilai hipotesis nol

$se(\hat{\beta}_1)$: Standar error

Rumusan hipotesis dari uji parsial setiap variabel independen sebagai berikut.

1. Variabel dana desa (X1)

$H_0 : \beta_1 = 0$, variabel dana desa tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

$H_0 : \beta_1 < 0$, variabel dana desa berpengaruh negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

2. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X2)

$H_0 : \beta_2 = 0$, variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

$H_0 : \beta_2 < 0$, variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

3. Variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi (X3)

$H_0 : \beta_3 = 0$, variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

$H_0 : \beta_3 < 0$, variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

4. Variabel pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial (X4)

$H_0 : \beta_3 = 0$, variabel pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial tidak berpengaruh terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

$H_0 : \beta_3 < 0$, variabel pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

Keputusan yang diperoleh dari hipotesis tersebut dengan melakukan perbandingan nilai t-statistik dengan nilai t-kritis. Jika nilai t-statistik lebih tinggi dari nilai t-kritis, maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 . Namun, jika nilai t-statistik lebih rendah dari nilai t-kritis, maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak H_0 . Pertimbangan lain dalam pengambilan keputusan melibatkan nilai Probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan, maka H_0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan maka gagal menolak H_0 .

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab analisis dan pembahasan penelitian penulis akan menjelaskan mengenai pengaruh Dana Desa, Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, dan Bidang Perlindungan Sosial secara bersamaan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang tahun 2015 sampai tahun 2022. Penelitian ini melakukan analisis pada sejumlah data cross section dan time series dengan 29 sampel kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Analisis data panel dilakukan dengan tujuan untuk menentukan metode yang tepat dalam melakukan analisis data-data hasil penelitian, dimana metode tersebut diantaranya Common Effect, Fixed, Effect, dan Random Effect. Dari ketiga metode analisis akan dipilih salah satu metode yang nantinya digunakan dalam tahap uji statistik. Pengujian yang akan digunakan dalam menentukan model yang dipakai diantaranya Uji F atau Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji T. Dalam melakukan pengujian estimasi ini menggunakan bantuan alat analisis Eviews 12.

4.1 Analisis Deskriptif Data

Dalam penelitian ini deskriptif data menjelaskan hasil mulai dari hasil nilai maksimum, nilai minimum, nilai mean, nilai standar deviation dan nilai median.

Tabel 4. 1 Data Analisis Deskriptif

	KEMISKINAN	DANA DESA	BELANJA PENDIDIKAN	BELANJA EKONOMI	BELANJA PERLINDUNGAN SOSIAL
Mean	136,0599	226,8013	741,1815	148,4794	114,2591
Median	119,05	222,66	729,62	125,93	20,28
Maximum	352	492,48	1831,81	543,83	1083,58
Minimum	58	36,18	17,35	2,26	1,21
Std. Dev.	59,80419	98,02482	206,4492	90,53744	254,4468

Sumber : Olah Data Eviews 12

Berdasarkan pada tabel 4.1 menunjukkan hasil statistika deskriptif sebagai berikut:

Diperoleh bahwa Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen didapatkan hasil paling tinggi sebesar 352 juta jiwa yang terdapat pada Kabupaten Brebes tahun 2015. Sedangkan Tingkat Kemiskinan paling rendah sebesar 58 juta jiwa terdapat pada Kabupaten Kudus tahun 2019. Jika dihitung rata-rata pada rentang tahun 2015-2022 angka kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 136,05 juta jiwa, dengan angka nilai standar deviasinya sebesar 59,80 juta jiwa lebih kecil dari pada nilai rata-rata. Hasil ini menunjukkan nilai dari tingkat kemiskinan relatif stabil. Dan jika dilihat lebih lanjut nilai median sebesar 119,05 juta jiwa lebih kecil daripada nilai mean yang artinya variasi data kemiskinan kecil tiap kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Diperoleh bahwa Dana Desa sebagai variabel independen didapatkan hasil paling tinggi sebesar 492,48 miliar yang terdapat pada Kabupaten Brebes tahun 2020. Sedangkan Dana Desa paling rendah sebesar 36,18 miliar terdapat pada Kabupaten Kudus tahun 2015. Jika dihitung rata-rata pada rentang tahun 2015-2022 angka Dana Desa pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 226,80 miliar, dengan angka nilai standar deviasinya sebesar 98,02 miliar lebih kecil daripada nilai rata-rata.

Diperoleh bahwa Belanja Pendidikan sebagai variabel independen didapatkan hasil paling tinggi sebesar 1831,81 miliar yang terdapat pada Kabupaten Cilacap tahun 2022. Sedangkan Belanja Pendidikan paling rendah sebesar 17,35 miliar terdapat pada Kabupaten Temanggung tahun 2016. Jika dihitung rata-rata pada rentang tahun 2015-2022 angka Belanja Pendidikan pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 741,18 miliar, dengan angka nilai standar deviasinya sebesar 206,44 miliar lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

Diperoleh bahwa Belanja Ekonomi sebagai variabel independen didapatkan hasil paling tinggi sebesar 543,83 miliar yang terdapat pada Kabupaten Semarang tahun 2020. Sedangkan Belanja Ekonomi paling rendah sebesar 2,26 miliar terdapat pada Kabupaten Wonogiri tahun 2020. Jika dihitung rata-rata pada rentang tahun 2015-2022 angka Belanja Ekonomi pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 148,47 miliar, dengan angka nilai standar deviasinya sebesar 90,53 miliar lebih kecil daripada nilai rata-rata.

Diperoleh bahwa Belanja Perlindungan Sosial sebagai variabel independen didapatkan hasil paling tinggi sebesar 1083,58 miliar yang terdapat pada Kabupaten Banyumas tahun 2015. Sedangkan Belanja Perlindungan Sosial paling rendah sebesar 1,21 miliar terdapat pada Kabupaten Temanggung tahun 2016. Jika dihitung rata-rata pada rentang tahun 2015-2022 angka Belanja Perlindungan Sosial pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 114,25 miliar, dengan angka nilai standar deviasinya sebesar 254,44 miliar lebih besar daripada nilai rata-rata.

4.2 Hasil Estimasi Model Panel

4.2.1 Common Effect Mode (CEM)

Pada Tabel 4.2. tertera hasil regresi *common effect model* dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Regresi Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)

Method: Panel Least Squares. Sample: 2015 2022. Cross-sections included: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.4084			
LOG(DANA_DESA)	0.3762	0.0675	5.5754	0.0000
LOG(BELANJA_PENDIDIKAN)	0.2055	0.0689	2.9837	0.0032
LOG(BELANJA_EKONOMI)	-0.0602	0.0380	-1.5842	0.1145
LOG(BELANJA_PERLINDUNGAN_SOSIAL)	0.1102	0.0254	4.3304	0.0000
R-squared	0.2394	F-statistic		17.8632
Adjusted R-squared	0.2260	Prob(F-statistic)		0.0000
Durbin-Watson stat	0.3256			

Sumber : Olah Data Eviews 12

4.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Pada Tabel 4.3. tertera hasil regresi *fixed effect model* dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)				
Method: Panel Least Squares. Sample: 2015 2022. Cross sections included: 29				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.7265			
LOGDANA_DESA	-0.1282	0.0191	-6.7075	0.0000
LOGBELANJA_PENDIDIKAN	-0.0321	0.0157	-2.0467	0.0420
LOGBELANJA_EKONOMI	0.0003	0.0082	0.0405	0.9678
LOGBELANJA_PERLINDUNGAN_SOSIAL	-0.0022	0.0061	-0.3684	0.7130
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.9792	Akaike info criterion		-2.5804
Adjusted R-squared	0.9758	Schwarz criterion		-2.0901
Sum squared resid	0.7741	F-statistic		292.1030
Durbin-Watson stat	1.7223	Prob.F		0.0000

Sumber : Olah Data Eviews 12

4.2.3 Random Effect Model (REM)

Pada Tabel 4.4. tertera hasil regresi *random effect model* dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Regresi Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects). Sample: 2015 2022				
Cross-sections included: 29				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.6568			
LOG(DANA_DESA)	-0.1177	0.0190	-6.1954	0.0000
LOG(BELANJA_PENDIDIKAN)	-0.0304	0.0156	-1.9477	0.0527
LOG(BELANJA_EKONOMI)	-0.0008	0.0081	-0.0935	0.9256
LOG(BELANJA_PERLINDUNGAN_SOSIAL)	0.0003	0.0061	0.0520	0.9586
Weighted Statistics				
R-squared	0.3633	F-statistic		32.3799
Adjusted R-squared	0.3521	Prob(F-statistic)		0.0000
Durbin-Watson stat	1.1964			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.1303	Mean dependent var		4.8294
Sum squared resid	41.9759	Durbin-Watson stat		0.0311

Sumber : Olah Data Eviews 12

4.3 Uji Pemilihan Model

4.3.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan model yang terbaik antara model regresi *common effect model* dengan *fixed effect model*. Hasil uji chow ditampilkan pada tabel 4.2.

H_0 = *common effect model* lebih baik dari pada *fixed effect model*

H_1 = *fixed effect model* lebih baik dari pada *common effect model*

Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FIXED			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	252,207568	-28,199	0,00
Cross-section Chi-square	834,490569	28	0,00

Sumber : Olah Data Eviews 12

Dari hasil Uji Chow yang telah dilakukan menggunakan Eviews 12 diketahui nilai probabilitas cross section Chi-square $0,0000 < \alpha 5\%$, maka hasilnya menolak H_0 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan *fixed effect model* lebih tepat dibandingkan dengan *common effect model*.

4.3.2 Hasil uji LM

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih model estimasi terbaik dengan membandingkan estimasi data panel *random effect model* atau estimasi data panel *common effect model* metode OLS. Hipotesisnya ditulis sebagai berikut:

H_0 = *common effect model* lebih baik dari pada *Random effect model*

H_1 = *Random effect model* lebih baik dari pada *common effect model*

Tabel 4. 6 Hasil Uji Langrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	310.6690	65.3134	375.9824
	0.0000	0.0000	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews 12

Berdasarkan pada hasil uji LM diatas, telah diperoleh nilai probabilitas Breunsch-Pagan sebesar 0.0000, yang menunjukkan nilai probabilitas Breunch-Pagan 0.0000 lebih kecil dari $\alpha = 0.01$. Sehingga keputusan yang dapat diambil ialah menolak hipotesis nol (H_0). Artinya model estimasi data panel dengan *random effect model* lebih tepat dibandingkan *common effect model* dengan OLS.

4.3.3 Uji Hausman

Dalam Uji Chow didapatkan hasil dari fixed effect model lebih tepat digunakan, selanjutnya adalah melakukan pengujian apakah *random effect model* lebih baik dibandingkan dengan *fixed effect model* dengan menggunakan Uji Hausman. Hasil uji Hausman ditampilkan pada tabel 4.4.

Untuk hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H_0 = *random effect model* lebih baik dari pada *fixed effect model*

H_1 = *fixed effect model* lebih baik dari pada *random effect model*

Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: RANDOM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	57,82897	4	0,00

Sumber : Olah Data Eviews 12

Dari Uji Hausman yang dilakukan menggunakan Eviews 12 diketahui nilai probabilitas cross section random $0,0000 < \alpha 5\%$, maka hasilnya menolak H_0 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model yang terbaik adalah menggunakan *fixed effect model*.

4.4 Analisis Hasil Regresi

4.4.1 Koefisien Determinan R^2 Uji Parsial (Uji T)

Koefisien determinan R^2 atau R-square adalah keofisien yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan pada hasil regresi dengan *fixed effect model*, diperoleh nilai R-squared sebesar 0.97 atau 97%. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa 97% terdapat perubahan pada variabel kemiskinan yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel dana desa, belanja pendidikan, belanja ekonomi, dan belanja perlindungan sosial, sedangkan sisanya sebesar 3% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

4.4.2 Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji F)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersamaan apakah memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Diperoleh nilai F-statistiknya sebesar 292.103 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 5% (0.05), dengan ini dapat diartikan bahwa secara bersamaan variabel Dana Desa, Belanja Pendidikan, Belanja Ekonomi dan Belanja Perlindungan Sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada Kabupaten di Jawa Tengah.

4.4.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pada variabel independen apakah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 8 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.726487	0.105023	54.52608	0.0000
LOG(DANA_DESA)	-0.128244	0.01912	-6.707469	0.0000
LOG(BELANJA_PENDIDIKAN)	-0.032071	0.015669	-2.046688	0.0420
LOG(BELANJA_EKONOMI)	0.00033	0.008155	0.040476	0.9678
LOG(BELANJA_PERLINDUNGAN_SOSIAL)	-0.00224	0.00608	-0.36839	0.7130
Mean dependent var	4.829416			
S.D. dependent var	0.400948			
Durbin-Watson stat	1.722273			
R-squared	0.979154			
Adjusted R-squared	0.975802			
F-statistic	292.103			
Prob(F-statistic)	0.0000			

Pada tabel 4.4 disajikan hasil dari estimasi *fixed effect model*. Hasil regresi data panel dengan menggunakan *fixed effect model* menjelaskan bahwa variabel

Dana Desa memperoleh nilai koefisien sebesar -0.128244 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 1 % (0.01), sehingga disimpulkan bahwa variabel Dana Desa secara statistik memiliki pengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada Kabupaten di Jawa Tengah.

Variabel Belanja Pendidikan memperoleh nilai koefisien sebesar -0.032071 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0420 lebih kecil dari alpha 5% (0.05), sehingga disimpulkan bahwa variabel Belanja Pendidikan secara statistik memiliki pengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada Kabupaten di Jawa Tengah.

Variabel Belanja Ekonomi memperoleh nilai koefisien sebesar 0.00033 dengan nilai probabilitas sebesar 0.9678 lebih besar dari alpha 10% (0.1), sehingga disimpulkan bahwa variabel Belanja Ekonomi secara statistik tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap kemiskinan pada Kabupaten di Jawa Tengah.

Variabel Belanja Perlindungan Sosial memperoleh nilai koefisien sebesar -0.00224 dengan nilai probabilitas sebesar 0.7130 lebih besar dari alpha 10% (0.1), sehingga disimpulkan bahwa variabel Belanja Perlindungan Sosial secara statistik tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada Kabupaten di Jawa Tengah.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pada estimasi fixed effect, didapati bahwa Dana Desa berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2022. Nilai koefisien yang didapat pada variabel Dana Desa sebesar -0.1282. Artinya jika terjadi kenaikan dana desa 1, maka penduduk miskin pada 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah akan terjadi penurunan sebesar 12,82 persen dengan anggapan bahwa variabel lain tetap.

Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana Desa memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini

pemerintah sebenarnya sudah mengupayakan pengentasan kemiskinan dengan berbagai macam strategi. Dari beberapa macam strateginya adalah dengan melalui kebijakan transfer pendapatan. Kebijakan tersebut asalnya dari pemerintah pusat yang disalurkan kepada pemerintah daerah atau disebut dengan otonomi daerah. Melalui pemerintah daerah Dana Desa dialokasikan pada pembangunan infrastruktur. Ini sesuai dengan dugaan bahwa dana desa memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan penambahan jumlah dana desa tiap tahun mengurangi tingkat kemiskinan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigit & Kosasih (2020) yang menjelaskan mengenai dana desa yang berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Dana Desa memiliki potensi dalam mendorong pembangunan ekonomi yang ada di desa. Dana Desa dapat digunakan dalam melakukan pembiayaan program pembangunan, misalnya pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya bantuan berupa Dana Desa, masyarakat desa mempunyai potensi dalam melakukan peningkatan akses mereka terhadap sumber daya dan peluang dalam perekonomian, sehingga kedepannya dapat meningkatkan pendapatan dan nantinya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Afriansyah (2020), yang menyatakan bahwa pemanfaatan dana desa dalam hal pembangunan desa memberikan kemudahan masyarakat yang dalam kategori kurang mampu guna mendapatkan pelayanan dasar seperti kesehatan. Pemanfaatan Dana Desa bisa juga melalui program yang ditujukan kepada masyarakat, seperti pola hidup sehat, menjaga kesehatan, dan masih banyak lagi. Dengan adanya pemanfaatan yang sedemikian diharapkan mampu untuk memutus rantai kemiskinan dan melahirkan pola berpikir untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik.

4.5.2 Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pada hasil estimasi fixed effect, didapati bahwa Belanja Pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2022. Nilai koefisien yang didapat pada variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan sebesar -0.0321. Artinya jika terjadi

kenaikan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan 1, maka penduduk miskin pada 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah akan terjadi penurunan sebesar 3,21 persen dengan anggapan bahwa variabel lain tetap.

Penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hofmarcher (2021), yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Bloom et al (2006), yang dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Dengan demikian membuktikan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Kuznet dalam (Todaro, 2011), pendidikan merupakan salah satu cara dalam menyeleamatkan diri dari kemiskinan. Menurut Todaro, pendidikan merupakan tujuan mendasar dari suatu pembangunan, pendidikan juga memiliki peran kunci dalam membentuk kemampuan seseorang ataupun negara dalam menghadapi perkembangan zaman, peran kunci dari pendidikan seperti penyerapan mengenai perkembangan teknologi modern dan juga untuk mencapai kapasitas yang nantinya menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pendidikan mampu memberikan kekuatan untuk maju lewat pengetahuan serta keterampilan yang akan meningkatkan produktifitas, terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan kemiskinan. Semakin tingkat pendidikan manusia akan memberikan peningkatan pengetahuan dan kemampuan, dengan ini berpotensi pada semakin besar kemampuan manusia untuk lebih produktif lagi. Dan pada akhirnya, dengan produktifitas yang semakin tinggi akan mendorong untuk peningkatan kesejahteraan, dengan melakukan pengamatan pada pendapatan dan pengeluaran.

4.5.3 Analisis Pengaruh Belanja Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pada hasil estimasi fixed effect, didapati bahwa Belanja Ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2022. Nilai koefisien yang didapat pada variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi sebesar 0.0003. Artinya jika terjadi kenaikan Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi 1, maka penduduk miskin pada

29 kabupatèn di Provinsi Jawa Tengah akan terjadi penurunan sebesar 0,03 persen dengan anggapan bahwa variabel lain tetap.

Pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi merupakan pengeluaran yang dilakukan guna mendukung strategi dari kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan ekonomi melalui beberapa langkah, diantaranya peningkatan dan energi, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan informatika, serta juga peningkatan akses dalam permodalan dan daya saing dari UMKM hingga koperasi. Menurut Rakhmah Sania (2019), memaparkan mengenai beberapa subfungsi yang termasuk dalam pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, diantaranya subfungsi transportasi, pertanian, kehutanan dan perikanan, pengairan, dan juga energi dan bahan bakar.

Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana et al (2023), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Azwardi (2014), yang dalam penelitiannya belanja fungsi ekonomi berpengaruh nyata positif terhadap penduduk miskin. Dengan hasil yang demikian, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi belum mampu dalam menurunkan kemiskinan, dalam praktiknya pengeluaran pemerintah bidang ekonomi malah kurang dinikmati oleh penduduk miskin.

Pada setiap sistem perekonomian, pengeluaran bidang ekonomi sangat diperlukan, bukan hanya sebagai penyedia barang publik semata, namun juga sebagai pengalokasi barang produksi dan konsumsi, disamping memperbaiki dalam distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk didalamnya stabilitas ekonomi, serta juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, pemerintah hendaknya melakukan evaluasi pada semua pengeluaran bukan hanya pada bidang ekonomi, demi menurunkan kemiskinan.

Diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, Mulai dari faktor efisiensi dalam penggunaan dana, korupsi dan penyalahgunaan dana, birokrasi, alokasi dana yang tidak tepat, ketidaksesuaian program, kebijakan yang tidak konsisten, keberlanjutan program, merupakan beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab dari pengeluaran

pemerintah bidang ekonomi tidak signifikan dalam mengurangi kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah.

4.5.4 Analisis Pengaruh Belanja Perlindungan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pada hasil estimasi fixed effect, didapati bahwa Belanja Perlindungan Sosial tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2022. Nilai koefisien yang didapat pada variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial sebesar -0.0022. Artinya jika terjadi kenaikan Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial 1, maka penduduk miskin pada 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah akan terjadi penurunan sebesar 0,22 persen dengan anggapan bahwa variabel lain tetap.

Permasalahan ini bisa disebabkan dari kebijakan pengeluaran pemerintah pada perlindungan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), kebijakan subsidi dan yang lainnya tidak tepat sasaran. Adanya target yang tidak tepat yang demikian dapat menimbulkan adanya kesalahan dalam pendataan antara yang dicantumkan dengan yang seharusnya tidak dicantumkan sehingga pada akhirnya menyebabkan penengeluaran yang tidak efektif dalam upaya membantu masyarakat dari belenggu kemiskinan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2019), yang menyatakan penyaluran bantuan sosial belum mampu dalam upaya mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Annisa Marni Melati et al (2021), yang menyatakan bahwa belanja sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, penyebabnya manfaat dan juga dampak yang diterima sangat minim sehingga sangat sulit dalam membantu masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan, dan juga terdapat penyebab lain yakni pemerintah kesulitan dalam melakukan identifikasi masyarakat miskin dan ketepatan penerima bantuan.

Diperlukan analisis lebih lanjut lagi mengenai Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial, efisiensi dan efektivitas program, korupsi dan penyalahgunaan dana, desain kebijakan dari pemerintah mengenai ketidaktepatan target penerima, dan jumlah bantuan yang kurang mencukupi, kurangnya pemantauan dan juga evaluasi dalam penyaluran dana, kurangnya dalam koordinasi

antar departemen, misalnya dengan departemen pendidikan, ketidakakuratan data. Diperlukan adanya perbaikan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pemantauan program guna meningkatkan signifikansi pengaruh dari Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan khususnya di Jawa Tengah.

4.6 Analisis Intersep

Tabel 4. 9 Hasil Intersep Setiap Kabupaten

ID Pemda	Nama Kabupaten	Koefisien Per Kabupaten	Koefisien C	Intersep
1101	Banjarnegara	0.178398	5.726487	5.904885
1102	Banyumas	0.721167	5.726487	6.447654
1103	Batang	-0.564454	5.726487	5.162033
1104	Blora	-0.161653	5.726487	5.564834
1105	Boyolali	-0.190177	5.726487	5.536310
1106	Brebes	1.001353	5.726487	6.727840
1107	Cilacap	0.548362	5.726487	6.274849
1108	Demak	0.179015	5.726487	5.905502
1109	Grobogan	0.346949	5.726487	6.073436
1110	Jepara	-0.331289	5.726487	5.395198
1111	Karanganyar	-0.332320	5.726487	5.394167
1112	Kebumen	0.614969	5.726487	6.341456
1113	Kendal	-0.230050	5.726487	5.496437
1114	Klaten	0.279602	5.726487	6.006089
1115	Kudus	-0.765504	5.726487	4.960983
1116	Magelang	0.232364	5.726487	5.958851
1117	Pati	0.108016	5.726487	5.834503
1118	Pekalongan	-0.244015	5.726487	5.482472
1119	Pemalang	0.554338	5.726487	6.280825
1120	Purbalingga	0.207503	5.726487	5.933990
1121	Purworejo	-0.282784	5.726487	5.443703
1122	Rembang	-0.194279	5.726487	5.532208
1123	Semarang	-0.497689	5.726487	5.228798
1124	Sragen	-0.079294	5.726487	5.647193
1125	Sukoharjo	-0.629677	5.726487	5.096810
1126	Tegal	0.023346	5.726487	5.749833
1127	Temanggung	-0.480344	5.726487	5.246143
1128	Wonogiri	-0.130450	5.726487	5.596037
1129	Wonosobo	0.118599	5.726487	5.845086

Sumber : Olah Data Eviews 12

Analisis intersep dilakukan dengan cara meninjau hasil dari estimasi data panel kemudian menjumlahkan konstanta dengan hasil estimasi koefisien *cross effect*. Menurut Sriyana (2014), dalam penelitiannya menjelaskan koefisien *cross effect* didapatkan melalui estimasi pada setiap individu.

Berdasarkan dari analisis data yang dilakukan, pada setiap kabupaten dapat disimpulkan bahwa memiliki nilai intersep yang berbeda-beda. Ini dapat diamati pada tabel diatas, semisal contohnya pada Kabupaten Brebes yang memiliki nilai intersep tertinggi dengan nilai sebesar 6.7278. Ini dapat dijelaskan jika variabel dana desa, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial tidak berpengaruh atau bernilai nol, maka dapat diartikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes akan bernilai sebesar 6.7278.

Di lain sisi, dapat diamati pada tabel bahwa Kabupaten Kudus yang memiliki nilai intersep paling rendah diantara yang lainnya dengan nilai sebesar 4.9610. Dengan ini dapat dijelaskan, bahwa jika variabel dana desa, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, dan pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial tidak berpengaruh atau bernilai nol, maka dapat diartikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus akan bernilai sebesar 4.9610.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Dari proses analisis serta pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil dari pengujian dengan *fixed effect model* dalam analisis regresi dan hasil uji signifikansi secara individu menunjukkan terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari Dana Desa dengan Tingkat Kemiskinan pada 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2022. Dengan demikian Dana Desa mampu mengurangi kemiskinan, karena pada dasarnya dana desa sendiri dianggarkan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya untuk tingkat desa.
2. Berdasarkan hasil dari pengujian dengan *fixed effect model* dan uji signifikansi menunjukkan bahwa berpengaruh negatif yang signifikan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan pada 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2022. Dengan didapatkannya hasil yang demikian pendidikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, karena pendidikan mampu memberikan kekuatan untuk maju lewat pengetahuan serta keterampilan yang akan meningkatkan produktivitas.
3. Berdasarkan hasil dari pengujian dengan *fixed effect model* dan uji signifikansi menunjukkan bahwa berpengaruh positif namun tidak signifikan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2022. Dengan demikian menunjukkan bahwa bidang ekonomi belum memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, karena dalam kenyataannya kebijakan yang telah diterapkan belum mampu dinikmati oleh masyarakat miskin.
4. Berdasarkan hasil dari pengujian dengan *fixed effect model* dan uji signifikansi diperoleh hasil bahwa berpengaruh negatif dan tidak signifikan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial dengan Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2022. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial belum berpengaruh terhadap

kemiskinan, karena bantuan yang disalurkan selama ini masih terlalu minim dan banyak salah sasaran.

5.2 Implikasi

1. Meninjau dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan dana desa memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Peningkatan volume Dana Desa yang disalurkan kepada tiap desa bisa menjadi fokus utama dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sebagai upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan tingkat kesenjangan. Pengelolaan yang baik nantinya juga sebagai tolak ukur memastikan manfaat bagi masyarakat dapat dirasakan secara adil dan juga berkelanjutan.
2. Meninjau dari kondisi yang ada, baik pemerintah pusat maupun daerah kembali mempertimbangkan untuk melakukan peningkatan jumlah anggaran pada sektor pendidikan guna melaksanakan beberapa program yang prioritas dan ditujukan dan berorientasi kepada masyarakat khususnya kalangan miskin, sehingga penyerapannya bisa maksimal terserap kepada masyarakat yang kurang mampu, dan ini sangat efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Sama halnya dengan sektor pendidikan, pada sektor ekonomi pemerintah diharapkan mengupayakan peningkatan dalam pendanaan ekonomi khususnya sehingga nantinya tingkat kesejahteraan mampu tercapai, karena pembelanjaan masyarakat atas barang maupun jasa dan juga faktor utama yang terbukti dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dicapai suatu daerah.
4. Pengeluaran pemerintah pada bidang perlindungan sosial belum mampu secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan. Beberapa program yang ditujukan untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar tidak berjalan sesuai rencana, diharapkan dilakukan pengkajian ulang dalam validitas data dan penreapan program pemeberdayaan masyarakat yang berkelanjutan yang nantinya mendorong masyarakat untuk mandiri dan mengurangi tingkat ketergantungan.

Daftar Pustaka

- Aditia, N. M. A., & Dewi, N. P. M. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(2), 212-242.
- Aini, R. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro*, 8(2), 50-75.
- Akba, A. (2018). KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN. *Jurnal HUMANIS*, 4(1), 72-89.
- Ambya, A. (2020). Transformasi Alokasi Dana Desa terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Wilayah Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 16-23.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 2722-8096.
- Artino, A., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Keterkaitan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Utara. *Tataloka*, 21(3), 381.
- Azwardi, A. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Indonesia untuk Fungsi Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan serta Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Penduduk Miskin Tahun 2011-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 1-11.
- Bappenas. (2018). Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. *Kedeputan Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan*, 1-80.
- Bappenas. (2020). *Pilar Pembangunan Sosial (Edisi kedua)*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Carolina, M. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7, 165-180.
- Ch, D., Lelang, C., Panggabean, M. L., Sudjiarto, T., Pascasarjana, P. M., & Indonesia, U. K. (2023). *Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Manggarai yang Dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Manggarai*. 3, 8552-8566.
- Daniel, P. A., Soleh, A., Kurniawan, H., & Firmansyah, D. (2021). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 9(1), 40-51.
- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. (2022). *Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019*. 44, 1-47.
- Djaenal, R., J. E. Kaawoan, & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Jurnal Governance*, 1(2), 1-8.
- Eliza, Y. (2018). Multisektor kemiskinan di Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*.
- Habibah, A. N., Ghafur, R. A., Anggraeni, E., & Malik, A. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 251.
- Habibullah. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(1),

1–14.

Handayani, S., Suharno, S., & Badriah, L. (2022). The Effectiveness of Local Government Spending on Poverty Rate Reduction in Central Java, Indonesia. *Eko-Regional*, 17(1) 1–8.

Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Pustaka Taman Ilmu.

Hidayat, A. Y., & Azhar, Z. (2022). Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 65–74.

Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 86–103.

Jaelani, A. (2018). Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review on State Budget 2017. *SSRN Electronic Journal*, 1–14.

Kamaruddin, K., Kadewi Sumbawati, N., & Hidayat, R. (2022). Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Studi Di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 73–81.

Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2022). *Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2022*.

Kemenkeu. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kemenkeu. (2023). *Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 Provinsi Jawa Tengah*.

Mailassa'adah, M., Pudjihardjo, P., & Burhan, U. (2019). The Effect of Governmentspending on Education, Health and Social Protection Sectors Towards the Human Development Index in Central Kalimantan. *International Journal of Social and Local Economic Governance*, 5(1), 42–48.

Marni Melati, A., Sudrajat, & Imanina Burhany, D. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 422–430.

Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia (Fiscal Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia). *Law Reform*, 15(1), 149–163.

Muliati, M., Wulansari, D., & Handoyo, R. D. (2019). Alokasi Anggaran Publik Dan Pengentasan Kemiskinan Di Pulau Kalimantan. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(4), 371-384.

Mulyadi, M. (2016). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat. *Jurnal Kajian*, 21(3), 221–236.

Nurcahya, E., & Alexandri, M. B. (2020). Analisis Swot Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandung. *Jurnal MODERAT*, 6(2), 257–267.

Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran , Permasalahan dan Alternatif

- Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1–11.
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 106.
- Putriani, P., Junaidi, J., & Edi, J. K. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi Periode 2004-2017. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 7(3), 132–143.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
- Safitri, R. A. (2021). *Analisis Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Penurunan Jumlah Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Jember)*. Universitas Brawijaya
- Sari, W., Prayendi, D. A., Aulia, R. G., Idzni, H., Yunus, S. M., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(1), 1–10.
- Septriani. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 14(1), 41–51.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119.
- Sihombing, P. R., Muslianti, D., & Yunita. (2022). Apakah Dana Desa dan Fungsi Belanja APBD Mampu Mengatasi Kemiskinan di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(2), 236–243.
- Sinaga, E., Lubis, T. A., Andy, E., Situmorang, O., Harahap, A. S., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2022). Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatra Utara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 116–131.
- Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Info Artha*, 2(1), 65–89.
- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Sosiohumaniora*, 17(1), 21.
- Swandriano, F. A., & Arif, M. (2023). Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 71.
- Todaro, P. Michael & Stephen. C. Smith. (2015). *Economic Development 12th edition*. New York: Pearson.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UNDP. (2016). UNDP and the Concept and Measurement of Poverty. *Issue Brief, October*, 4.
- Wahyu, T. (2009). Kemiskinan Dan Bagaimana Memeranginya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(7), 946–949.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 103–113.
- Wahyuni, N. (2023). *ANALISIS PENGARUH ANGGARAN BELANJA FUNGSI EKONOMI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PERUMAHAN/FASILITAS UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI* (Doctoral dissertation, Ekonomi Pembangunan).
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Witta, S. R., Yulianita, A., Igamo, A. M., & Imelda, I. (2023). Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(3), 195–209.
- Yuliana, Y., Adamy, Y., Danerlly, D., & Faqroni, F. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Ekonomi Dan Fungsi Pelayanan Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 7(1), 8–14.

LAMPIRAN

Lampiran I

Data Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2022

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cilacap	243.50	240.20	238.30	193.20	185.20	198.60	201.71	190.96
Banyumas	285.90	283.90	283.20	226.20	211.60	225.84	232.91	220.47
Purbalingga	176.50	171.80	171.90	144.20	140.10	149.48	153.08	145.33
Banjarnegara	165.40	158.20	156.80	141.70	136.10	144.95	150.19	141.25
Kebumen	241.90	235.90	233.40	208.70	201.30	211.09	212.92	196.16
Purworejo	101.20	99.10	98.60	83.50	82.20	84.79	88.80	82.64
Wonosobo	166.40	160.10	159.20	138.30	131.30	137.63	139.67	128.11
Magelang	162.40	158.90	157.20	143.40	137.40	146.34	154.91	145.33
Boyolali	120.00	117.00	116.40	98.20	93.70	100.59	104.82	97.18
Klaten	172.30	168.00	165.00	151.70	144.10	151.83	158.23	144.87
Sukoharjo	79.90	78.90	76.70	65.40	63.60	68.89	73.84	68.72
Wonogiri	123.00	124.80	123.00	102.80	98.30	104.37	110.46	105.19
Karanganyar	106.40	107.70	106.80	87.80	84.50	91.72	95.41	88.56
Sragen	130.40	126.80	124.00	116.40	113.80	119.38	122.91	115.14
Grobogan	184.50	184.10	181.00	168.70	161.90	172.26	175.72	163.20
Blora	115.00	113.90	111.90	102.50	97.90	103.73	107.05	99.83
Rembang	119.10	115.50	115.20	97.40	95.30	100.08	101.40	94.56
Pati	147.10	144.20	141.70	123.90	119.00	127.37	128.74	118.04
Kudus	64.10	64.20	64.40	60.00	58.00	64.24	67.06	66.06
Jepara	100.60	100.30	99.00	86.50	83.50	91.14	95.22	89.08
Demak	160.90	158.80	152.60	144.10	137.60	146.87	151.74	143.01
Semarang	81.20	80.70	79.70	75.70	73.90	79.88	83.61	78.60
Temanggung	87.50	87.10	86.80	75.40	72.60	77.33	79.09	73.04
Kendal	109.30	107.80	106.10	94.70	91.20	97.49	100.00	93.03
Batang	83.50	82.60	81.50	66.10	64.10	70.57	74.91	69.94
Pekalongan	112.10	113.30	111.60	89.50	87.00	91.86	95.26	87.53
Pemalang	235.50	227.10	225.00	208.30	200.70	209.03	215.08	195.84
Tegal	143.50	144.20	141.80	114.10	109.90	117.50	123.52	113.62
Brebes	352.00	348.00	343.50	309.20	293.20	308.78	314.95	290.66

Sumber : Badan Pusat Statistika

Lampiran II

Data Realisasi Dana Desa Seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2022

Pemda	DANA DESA							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Banjarnegara	74,810,054.000	167,884,303.000	214,470,940.000	222,775,782.000	262,654,461.000	265,128,597.000	265,745,328.000	266,535,723.000
Kab. Banyumas	89,291,645.000	200,450,575.000	255,734,533.000	295,876,047.000	360,743,521.000	378,545,183.000	381,247,099.000	383,196,882.000
Kab. Batang	66,579,163.000	149,403,922.000	190,962,224.000	168,403,538.000	192,327,469.000	193,031,345.000	195,716,503.000	200,193,418.000
Kab. Blora	74,816,870.000	167,873,329.000	214,102,024.000	229,733,837.000	268,253,846.000	267,071,340.000	266,940,335.000	264,843,962.000
Kab. Boyolali	72,548,977.000	162,801,074.000	207,823,645.000	192,998,474.000	219,802,085.000	216,981,458.000	216,981,458.000	223,033,286.000
Kab. Brebes	94,563,325.000	212,385,910.000	270,922,338.000	344,197,496.000	441,009,459.000	492,478,504.000	492,478,504.000	453,819,700.000
Kab. Cilacap	81,060,083.000	181,985,398.000	232,084,054.000	240,787,259.000	286,955,948.000	293,893,896.000	299,424,381.000	308,764,756.000
Kab. Demak	73,852,473.000	165,814,611.000	211,595,493.000	229,565,688.000	276,950,857.000	284,463,387.000	284,463,387.000	279,969,116.000
Kab. Grobogan	80,175,760.000	179,971,455.000	229,625,434.000	248,195,231.000	289,687,819.000	302,016,826.000	303,339,252.000	307,655,877.000
Kab. Jepara	55,540,072.000	124,699,832.000	158,765,096.000	190,273,424.000	234,090,663.000	247,118,045.000	250,171,633.000	245,689,231.000
Kab. Karanganyar	46,196,873.000	103,686,344.000	133,065,748.000	138,839,437.000	160,000,995.000	166,130,456.000	169,314,064.000	169,874,596.000
Kab. Kebumen	125,844,565.000	282,401,546.000	359,998,061.000	350,691,179.000	395,411,358.000	405,025,869.000	405,260,453.000	416,756,373.000
Kab. Kendal	74,239,102.000	166,595,736.000	212,767,778.000	215,090,043.000	240,437,047.000	248,445,837.000	251,060,030.000	255,193,805.000
Kab. Klaten	108,674,969.000	243,866,425.000	311,087,447.000	320,940,593.000	374,660,994.000	380,846,600.000	380,846,601.000	379,338,801.000
Kab. Kudus	36,178,610.000	81,222,147.000	103,687,281.000	117,966,044.000	136,723,311.000	147,823,461.000	151,037,149.000	146,122,990.000
Kab. Magelang	101,155,122.000	226,980,301.000	289,613,899.000	325,360,832.000	383,071,777.000	391,044,107.000	391,044,109.000	393,231,309.000
Kab. Pati	110,946,620.000	248,952,687.000	317,453,410.000	365,454,541.000	417,038,558.000	426,380,834.000	426,380,834.000	426,815,696.000
Kab. Pekalongan	77,762,725.000	174,527,576.000	222,535,590.000	227,842,747.000	259,142,008.000	263,397,106.000	262,704,272.000	263,714,089.000
Kab. Pemalang	66,619,532.000	149,607,350.000	191,002,083.000	249,322,556.000	301,814,036.000	327,255,484.000	327,890,826.000	320,209,861.000
Kab. Purbalingga	66,606,973.000	149,527,020.000	191,224,910.000	199,934,262.000	237,221,605.000	245,675,204.000	246,883,340.000	246,998,927.000
Kab. Purworejo	124,419,463.000	279,101,050.000	355,968,664.000	326,085,184.000	366,917,898.000	363,993,225.000	363,993,225.000	346,381,470.000
Kab. Rembang	79,709,975.000	178,863,338.000	228,013,715.000	229,010,130.000	258,436,412.000	260,523,814.000	260,523,814.000	252,064,026.000
Kab. Semarang	57,840,951.000	129,797,974.000	165,688,573.000	157,084,768.000	181,931,854.000	184,666,676.000	188,339,520.000	190,973,161.000
Kab. Sragen	56,174,163.000	126,080,582.000	160,952,196.000	146,148,323.000	168,044,095.000	171,103,129.000	175,365,649.000	182,671,645.000
Kab. Sukoharjo	43,045,054.000	96,619,355.000	123,576,433.000	126,076,256.000	146,662,487.000	144,973,519.000	148,043,106.000	148,559,522.000
Kab. Tegal	81,620,159.000	183,211,736.000	234,026,299.000	282,703,163.000	340,958,368.000	358,311,953.000	359,354,987.000	359,312,887.000
Kab. Temanggung	72,423,652.000	162,495,600.000	207,451,723.000	213,042,611.000	241,944,648.000	247,881,825.000	247,881,825.000	245,879,771.000
Kab. Wonogiri	69,330,086.000	155,565,696.000	198,745,821.000	196,188,133.000	227,393,914.000	224,649,959.000	224,681,357.000	213,348,940.000
Kab. Wonosobo	66,862,280.000	150,053,469.000	191,496,626.000	184,414,648.000	212,114,096.000	217,226,851.000	218,570,581.000	221,885,021.000

Sumber : DJPK, Kemenkeu

Lampiran III

Data Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan Seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022

PEMDA	PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab, Banjarnegara	677,170,069,026	1,416,880,218,982	756,508,828,017	725,452,552,621	733,172,229,357	677,668,472,287	747,573,778,235	719,511,657,526
Kab, Banyumas	1,083,581,042,808	1,083,581,042,808	1,123,975,611,189	1,115,095,101,773	1,139,967,040,413	1,095,735,451,513	1,128,126,970,750	882,922,152,093
Kab, Batang	579,770,659,951	505,999,695,887	492,237,135,158	587,017,679,131	561,817,591,857	559,440,492,900	576,452,915,524	547,444,981,087
Kab, Blora	701,713,560,668	698,827,447,915	712,440,083,014	728,095,145,644	758,993,981,065	675,448,355,648	692,400,855,771	704,065,619,998
Kab, Boyolali	773,527,483,688	180,409,054,686	750,223,105,531	723,829,083,472	768,086,524,153	683,015,382,642	738,782,550,078	703,851,934,007
Kab, Brebes	982,205,944,101	914,141,399,267	794,168,559,621	945,447,949,839	1,017,858,584,110	947,323,635,572	967,439,404,608	942,724,927,020
Kab, Cilacap	1,077,716,709,931	1,102,472,316,563	1,094,741,502,406	1,100,133,535,427	1,124,044,689,986	1,083,057,248,065	1,072,284,502,406	1,831,809,042,424
Kab, Demak	628,787,921,357	613,340,709,034	640,779,538,279	648,632,334,044	658,460,873,679	652,341,199,191	707,803,018,848	751,700,090,708
Kab, Grobogan	777,286,603,783	729,528,274,694	817,938,412,726	818,840,910,653	854,365,763,876	855,826,988,491	825,248,560,500	846,888,311,099
Kab, Jepara	345,219,727,162	466,949,441,367	754,791,642,839	205,994,120,098	194,087,850,805	709,894,101,455	775,184,907,996	814,574,393,854
Kab, Karanganyar	757,829,479,905	129,135,845,331	763,394,721,559	751,496,661,579	823,812,146,665	771,833,434,611	754,337,884,280	762,757,848,358
Kab, Kebumen	1,041,802,952,965	167,359,892,347	1,036,769,005,180	991,087,865,332	1,007,669,863,355	965,885,770,616	969,270,182,930	969,191,179,350
Kab, Kendal	676,216,603,985	695,793,369,106	733,519,630,014	758,115,870,121	787,453,350,255	701,529,706,979	730,370,670,593	741,198,104,673
Kab, Klaten	986,908,695,433	1,011,690,040,754	875,779,020,635	847,291,755,560	858,259,939,025	809,246,011,164	799,397,794,491	797,722,806,643
Kab, Kudus	608,978,813,321	646,897,817,359	684,773,115,555	626,800,957,062	600,133,079,961	594,255,752,680	599,355,293,931	633,279,735,067
Kab, Magelang	720,420,081,099	735,547,046,898	838,470,904,641	751,818,318,436	770,614,642,843	719,111,581,257	727,268,387,661	653,750,773,212
Kab, Pati	852,951,179,450	855,367,036,080	853,715,549,304	836,383,740,359	857,476,919,333	838,582,650,418	856,491,347,758	834,220,521,289
Kab, Pekalongan	644,731,335,339	554,303,646,573	692,710,772,141	701,202,811,019	735,798,229,372	679,215,895,579	732,535,917,697	678,778,241,731
Kab, Pemalang	867,387,047,742	815,911,807,837	907,817,242,901	891,708,920,918	917,133,502,319	902,686,789,389	945,195,687,438	917,358,096,167
Kab, Purbalingga	611,753,273,259	635,052,014,640	701,608,235,478	659,866,983,420	729,713,931,084	659,185,169,367	700,030,385,789	766,485,106,273
Kab, Purworejo	746,553,268,729	684,773,220,593	666,102,732,684	641,639,902,688	648,225,766,240	589,302,455,653	693,191,355,095	625,880,133,653
Kab, Rembang	433,612,214,114	123,614,626,493	542,307,603,576	552,475,965,930	573,033,551,515	510,394,226,077	560,636,853,812	559,454,260,561
Kab, Semarang	619,508,337,750	686,210,573,781	701,916,802,914	685,447,494,530	746,814,197,598	761,936,569,397	747,997,843,772	785,456,550,532
Kab, Sragen	848,652,048,034	762,821,252,299	770,050,773,762	739,617,918,154	716,567,522,038	688,446,190,892	683,956,163,679	680,555,456,675
Kab, Sukoharjo	640,897,085,613	724,286,923,843	683,062,818,050	673,205,502,674	692,861,650,404	646,336,880,686	648,032,523,546	601,705,440,653
Kab, Tegal	718,295,831,162	112,839,323,847	431,648,273,612	841,323,397,014	858,736,743,760	822,455,827,718	905,207,669,120	895,292,191,428
Kab, Temanggung	503,263,639,611	17,349,049,752	550,725,033,972	522,303,801,899	526,048,519,592	521,565,229,957	589,458,308,887	604,999,864,874
Kab, Wonogiri	854,980,630,885	617,340,083,464	908,853,082,525	880,379,243,069	890,198,815,278	862,299,956,918	871,062,548,618	834,252,565,604
Kab, Wonosobo	617,274,576,462	585,811,348,136	600,407,104,169	620,336,762,591	640,167,779,271	590,291,932,855	626,488,225,056	623,021,729,163

Sumber : DJPK, Kemenkeu

Lampiran IV

Data Realisasi Belanja Fungsi Ekonomi Seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022

PEMDA	PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG EKONOMI							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab, Banjarnegara	80,286,051,956	212,053,575,156	77,301,197,990	68,576,293,428	65,678,658,593	48,315,221,598	274,967,198,418	163,826,652,250
Kab, Banyumas	126,467,857,373	126,467,857,373	113,910,158,123	133,764,009,097	113,806,899,880	110,383,132,577	293,367,124,702	216,294,303,138
Kab, Batang	76,558,948,511	142,703,465,978	81,434,214,383	89,542,133,579	68,958,484,952	67,208,094,173	205,966,422,349	158,536,934,428
Kab, Blora	127,479,453,562	134,403,442,322	110,071,168,721	105,771,679,471	101,573,435,687	74,269,238,379	230,308,059,295	345,164,557,065
Kab, Boyolali	126,050,217,230	28,698,712,560	152,230,969,108	194,422,270,985	186,116,411,359	143,915,166,908	270,790,202,655	207,092,641,300
Kab, Brebes	120,841,851,650	147,380,370,262	93,934,646,000	115,711,099,814	122,718,300,383	87,605,821,872	420,371,790,983	327,961,202,657
Kab, Cilacap	155,988,146,423	243,436,243,071	185,186,315,248	158,794,377,536	152,399,508,749	130,498,557,710	480,053,296,122	388,968,830,446
Kab, Demak	118,196,095,006	139,298,407,914	126,760,069,545	140,186,503,824	118,128,533,122	96,737,903,661	245,044,048,127	130,939,182,572
Kab, Grobogan	119,356,697,092	179,959,361,496	141,464,374,796	107,772,400,678	126,802,900,957	104,489,715,213	256,529,354,370	351,348,691,080
Kab, Jepara	190,312,107,092	108,575,825,374	387,283,335,398	429,541,043,141	71,193,906,357	47,772,386,698	102,700,441,994	218,757,559,658
Kab, Karanganyar	111,662,593,005	36,639,172,388	96,076,706,512	93,554,384,736	104,774,417,084	77,701,729,007	234,057,525,008	120,819,192,400
Kab, Kebumen	131,382,808,700	34,154,370,799	117,218,932,167	143,760,501,152	184,623,155,920	111,871,910,908	264,170,644,280	214,522,954,000
Kab, Kendal	110,863,376,340	132,777,583,603	151,940,681,930	134,610,436,198	152,968,523,024	99,146,806,343	213,095,400,524	334,956,282,073
Kab, Klaten	92,985,446,018	86,434,594,879	119,358,970,979	130,956,864,276	133,440,105,001	92,659,349,760	214,155,508,613	202,817,789,763
Kab, Kudus	185,677,787,826	277,071,706,881	215,960,066,062	175,666,595,189	95,620,305,605	82,396,227,030	134,414,604,565	138,684,837,621
Kab, Magelang	111,893,629,011	140,271,361,630	135,609,057,785	176,697,684,714	122,294,229,825	74,514,143,572	120,860,922,282	166,813,736,347
Kab, Pati	125,809,459,391	170,058,194,791	129,908,978,975	125,040,473,529	128,758,472,393	117,916,927,568	280,346,668,758	243,639,512,345
Kab, Pekalongan	85,426,931,248	76,917,029,446	71,971,076,375	103,604,470,918	105,332,481,860	66,360,002,134	70,186,450,319	180,420,911,300
Kab, Pemalang	128,081,262,256	149,216,639,030	111,260,488,029	147,180,015,486	136,526,230,196	146,896,327,012	233,388,309,156	107,076,657,400
Kab, Purbalingga	84,852,424,390	130,332,826,413	122,735,111,962	94,535,529,942	103,858,531,704	89,585,261,440	185,826,185,932	140,144,293,000
Kab, Purworejo	100,763,917,864	77,827,192,077	111,577,168,330	109,482,197,094	101,115,488,974	69,691,220,222	245,297,609,471	280,555,015,351
Kab, Rembang	99,239,686,677	52,886,147,370	108,342,343,274	128,129,242,734	118,220,904,430	76,897,767,041	190,464,281,169	175,559,311,800
Kab, Semarang	229,168,499,711	136,290,367,705	457,601,896,825	501,398,351,849	502,944,414,704	543,829,539,683	356,745,802,876	314,583,655,400
Kab, Sragen	121,357,035,460	133,108,750,327	88,446,634,768	72,899,623,409	95,155,282,655	83,696,752,285	161,150,768,817	208,811,820,071
Kab, Sukoharjo	84,141,078,760	95,112,710,589	86,836,109,127	81,018,392,936	89,288,805,573	74,106,629,511	284,567,227,778	201,256,702,755
Kab, Tegal	93,407,646,010	14,832,905,177	59,252,308,978	109,696,042,766	158,073,596,507	85,454,296,024	226,455,832,904	213,338,678,450
Kab, Temanggung	78,939,924,252	5,322,215,854	80,633,541,781	83,895,377,821	66,178,038,818	52,102,987,976	162,929,845,967	68,985,679,601
Kab, Wonogiri	112,679,708,444	65,998,831,377	158,396,049,393	168,353,420,484	2,455,975,320	2,262,812,452	90,124,376,286	96,362,725,404
Kab, Wonosobo	95,013,855,363	65,405,547,538	71,896,838,879	117,475,197,069	167,567,856,047	131,401,352,863	155,121,550,119	227,881,154,623

Sumber : DJPK, Kemenkeu

Lampiran V

Data Realisasi Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2022

PEMDA	PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab, Banjarnegara	677,170,069,026	21,613,687,258	15,733,357,651	5,830,420,940	18,270,174,801	12,417,347,273	14,933,346,278	7,650,552,637
Kab, Banyumas	1,083,581,042,808	1,083,581,042,808	39,803,210,307	13,879,318,016	22,049,225,015	24,095,750,644	19,534,585,463	12,821,508,762
Kab, Batang	579,770,659,950	17,289,798,885	26,404,862,314	10,545,212,697	22,864,240,773	21,630,386,860	32,106,690,974	13,194,057,065
Kab, Blora	701,713,560,668	8,606,153,857	15,616,713,668	7,886,661,294	20,273,457,545	19,890,012,021	15,028,359,918	15,660,853,101
Kab, Boyolali	773,527,483,688	6,289,679,815	15,375,715,341	8,232,744,004	19,489,103,583	17,037,046,087	19,380,350,059	13,182,203,687
Kab, Brebes	982,205,944,101	14,094,854,000	23,270,001,814	9,448,455,504	29,630,551,739	25,370,695,731	16,736,505,378	10,119,983,575
Kab, Cilacap	1,077,716,709,931	23,902,684,549	21,887,914,395	7,733,177,743	23,490,833,790	22,602,706,651	29,654,604,637	14,302,346,639
Kab, Demak	628,787,921,357	18,061,979,711	21,196,938,715	7,867,504,377	17,617,436,308	41,616,574,840	20,294,970,645	22,023,890,380
Kab, Grobogan	777,286,603,783	28,315,995,833	29,316,670,467	10,190,777,804	26,423,849,992	19,066,312,264	22,692,540,277	14,281,570,874
Kab, Jepara	345,219,727,162	11,258,831,208	31,571,022,843	15,088,752,621	18,791,744,782	128,534,628,439	25,737,479,500	24,204,156,375
Kab, Karanganyar	757,829,479,905	3,641,397,982	25,865,171,143	10,275,280,738	25,811,853,108	24,276,098,469	21,962,295,842	17,007,752,607
Kab, Kebumen	1,041,802,952,965	3,597,812,073	28,260,409,560	11,585,864,423	30,160,835,360	20,859,245,051	16,682,062,602	8,969,942,283
Kab, Kendal	676,216,603,985	23,104,951,411	16,141,218,229	10,074,533,404	23,397,016,379	16,150,859,708	16,937,605,617	20,719,517,892
Kab, Klaten	986,908,695,433	23,351,236,356	26,325,181,732	9,223,269,242	39,166,249,393	20,447,995,655	17,487,075,848	17,633,242,480
Kab, Kudus	608,978,813,321	13,110,848,172	21,053,048,119	12,359,161,888	27,080,163,248	21,892,857,768	17,969,807,272	98,242,647,294
Kab, Magelang	720,420,081,099	18,141,866,911	32,364,730,452	11,293,589,223	28,265,599,760	18,537,625,559	14,066,233,743	15,523,814,024
Kab, Pati	852,951,179,450	21,087,176,614	21,507,948,299	6,784,035,830	17,704,166,920	19,338,513,173	18,159,316,644	12,333,726,984
Kab, Pekalongan	644,731,335,339	14,009,097,449	18,268,348,439	10,150,776,319	23,471,001,351	38,862,125,981	31,373,385,759	10,008,096,865
Kab, Pemalang	867,387,047,742	14,292,354,118	24,376,642,912	8,408,006,731	26,663,207,432	22,140,702,350	30,764,332,175	17,738,325,365
Kab, Purbalingga	611,753,273,259	17,754,066,302	27,907,158,155	8,177,885,340	16,869,964,316	14,838,958,733	26,192,349,583	19,331,296,477
Kab, Purworejo	746,553,268,729	24,723,357,967	30,063,875,457	12,569,363,013	20,599,620,214	17,408,450,753	18,762,665,481	13,713,403,177
Kab, Rembang	433,612,214,114	2,527,507,622	19,990,647,420	12,485,262,018	21,888,350,564	14,424,275,828	14,605,089,810	13,776,912,176
Kab, Semarang	619,508,337,750	18,701,153,140	21,194,988,844	11,011,920,470	26,516,524,404	46,361,944,328	24,999,554,034	19,382,329,170
Kab, Sragen	848,652,048,034	12,769,475,457	14,505,026,071	7,630,996,116	15,612,941,827	16,311,987,973	37,222,576,493	10,691,359,979
Kab, Sukoharjo	640,897,085,613	22,924,753,936	60,655,967,382	12,117,040,372	28,908,871,500	23,371,874,850	31,605,024,271	38,464,220,995
Kab, Tegal	718,295,831,162	2,422,191,185	15,856,873,500	14,638,288,855	30,184,852,052	22,010,052,008	23,638,681,733	20,988,678,616
Kab, Temanggung	503,263,639,611	1,212,042,069	24,694,103,638	12,344,601,750	21,484,351,828	29,267,663,388	36,501,918,218	22,782,538,549
Kab, Wonogiri	854,980,630,885	13,369,202,168	14,592,502,467	7,755,908,808	7,755,908,808	7,755,908,808	14,815,920,581	15,943,098,528
Kab, Wonosobo	617,274,576,462	8,258,573,363	15,494,722,408	5,613,135,923	22,850,064,056	29,354,276,147	32,759,190,312	14,189,579,233

Sumber : DJPK, Kemenkeu

Lampiran VI
Common Effect Model

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)
Method: Panel Least Squares
Date: 06/02/24 Time: 10:05
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 29
Total panel (balanced) observations: 232

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.408351	0.423582	3.324858	0.0010
LOG(DANA_DESA)	0.376229	0.067480	5.575437	0.0000
LOG(BELANJA_PENDIDIKAN)	0.205483	0.068868	2.983731	0.0032
LOG(BELANJA_EKONOMI)	-0.060199	0.038000	-1.584205	0.1145
LOG(BELANJA_PERLINDUNGAN_SOSIAL)	0.110179	0.025443	4.330358	0.0000
Root MSE	0.348919	R-squared		0.239410
Mean dependent var	4.829416	Adjusted R-squared		0.226008
S.D. dependent var	0.400948	S.E. of regression		0.352741
Akaike info criterion	0.775152	Sum squared resid		28.24480
Schwarz criterion	0.849435	Log likelihood		-84.91767
Hannan-Quinn criter.	0.805110	F-statistic		17.86318
Durbin-Watson stat	0.325592	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Olah Data Eviews 12

Lampiran VII

Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/14/23 Time: 16:49
 Sample: 2015 2022
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 29
 Total panel (balanced) observations: 232

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.726487	0.105023	54.52608	0.0000
LOG(DANA_DESA)	-0.128244	0.019120	-6.707469	0.0000
LOG(BELANJA_PENDIDIKAN)	-0.032071	0.015669	-2.046688	0.0420
LOG(BELANJA_EKONOMI)	0.000330	0.008155	0.040476	0.9678
LOG(BELANJA_PERLINDUNGAN_SOSIAL)	-0.002240	0.006080	-0.368390	0.7130

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.057764	R-squared	0.979154
Mean dependent var	4.829416	Adjusted R-squared	0.975802
S.D. dependent var	0.400948	S.E. of regression	0.062370
Akaike info criterion	-2.580410	Sum squared resid	0.774117
Schwarz criterion	-2.090142	Log likelihood	332.3276
Hannan-Quinn criter.	-2.382690	F-statistic	292.1030
Durbin-Watson stat	1.722273	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Olah Data Eviews 12

Lampiran VIII

Random Effect Model

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/29/24 Time: 09:58
 Sample: 2015 2022
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 29
 Total panel (balanced) observations: 232
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.656758	0.114465	49.41918	0.0000
LOG(DANA_DESA)	-0.117741	0.019005	-6.195382	0.0000
LOG(BELANJA_PENDIDIKAN)	-0.030439	0.015628	-1.947729	0.0527
LOG(BELANJA_EKONOMI)	-0.000761	0.008140	-0.093525	0.9256
LOG(BELANJA_PERLINDUNGAN_SOSIAL)	0.000315	0.006054	0.052021	0.9586
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.250631	0.9417	
Idiosyncratic random		0.062370	0.0583	
Weighted Statistics				
Root MSE	0.068620	R-squared	0.363289	
Mean dependent var	0.423270	Adjusted R-squared	0.352069	
S.D. dependent var	0.086183	S.E. of regression	0.069372	
Sum squared resid	1.092434	F-statistic	32.37987	
Durbin-Watson stat	1.196373	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.130346	Mean dependent var	4.829416	
Sum squared resid	41.97585	Durbin-Watson stat	0.031136	

Sumber : Olah Data Eviews 12

Lampiran IX

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	252.207568	(28,199)	0.0000
Cross-section Chi-square	834.490569	28	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)
Method: Panel Least Squares
Date: 06/17/24 Time: 18:30
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 29
Total panel (balanced) observations: 232

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.408351	0.423582	3.324858	0.0010
LOG(DANA_DESA)	0.376229	0.067480	5.575437	0.0000
LOG(BELANJA_PENDIDIKAN)	0.205483	0.068868	2.983731	0.0032
LOG(BELANJA_EKONOMI)	-0.060199	0.038000	-1.584205	0.1145
LOG(BELANJA_PERLINDUNGAN_SOSIAL)	0.110179	0.025443	4.330358	0.0000
Root MSE	0.348919	R-squared		0.239410
Mean dependent var	4.829416	Adjusted R-squared		0.226008
S.D. dependent var	0.400948	S.E. of regression		0.352741
Akaike info criterion	0.775152	Sum squared resid		28.24480
Schwarz criterion	0.849435	Log likelihood		-84.91767
Hannan-Quinn criter.	0.805110	F-statistic		17.86318
Durbin-Watson stat	0.325592	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Olah Data Eviews 12

Lampiran X

Hasil Uji Langrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	393.3757 (0.0000)	77.75987 (0.0000)	471.1355 (0.0000)
Honda	19.83370 (0.0000)	8.818156 (0.0000)	20.25992 (0.0000)
King-Wu	19.83370 (0.0000)	8.818156 (0.0000)	16.75710 (0.0000)
Standardized Honda	20.78257 (0.0000)	11.57897 (0.0000)	18.85640 (0.0000)
Standardized King-Wu	20.78257 (0.0000)	11.57897 (0.0000)	16.52840 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	471.1355 (0.0000)

Sumber : Olah Data Eviews 12

Lampiran XI

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RANDOM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	57.828970	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(DANA_DESA)	-0.128244	-0.117741	0.000004	0.0000
LOG(BELANJA_PENDIDIKAN)	-0.032071	-0.030439	0.000001	0.1535
LOG(BELANJA_EKONOMI)	0.000330	-0.000761	0.000000	0.0284
LOG(BELANJA_PERLINDUNGAN_SOSIAL)	-0.002240	0.000315	0.000000	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)

Method: Panel Least Squares

Date: 06/17/24 Time: 18:33

Sample: 2015 2022

Periods included: 8

Cross-sections included: 29

Total panel (balanced) observations: 232

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.726487	0.105023	54.52608	0.0000
LOG(DANA_DESA)	-0.128244	0.019120	-6.707469	0.0000
LOG(BELANJA_PENDIDIKAN)	-0.032071	0.015669	-2.046688	0.0420
LOG(BELANJA_EKONOMI)	0.000330	0.008155	0.040476	0.9678
LOG(BELANJA_PERLINDUNGAN_SOSIAL)	-0.002240	0.006080	-0.368390	0.7130

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.057764	R-squared	0.979154
Mean dependent var	4.829416	Adjusted R-squared	0.975802
S.D. dependent var	0.400948	S.E. of regression	0.062370
Akaike info criterion	-2.580410	Sum squared resid	0.774117
Schwarz criterion	-2.090142	Log likelihood	332.3276
Hannan-Quinn criter.	-2.382690	F-statistic	292.1030
Durbin-Watson stat	1.722273	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Olah Data Eviews 12

Lampiran XII

Hasil Intercept

	CROSSID	Effect
1	1	0.178398
2	2	0.721167
3	3	-0.564454
4	4	-0.161653
5	5	-0.190177
6	6	1.001353
7	7	0.548362
8	8	0.179015
9	9	0.346949
10	10	-0.331289
11	11	-0.332320
12	12	0.614969
13	13	-0.230050
14	14	0.279602
15	15	-0.765504
16	16	0.232364
17	17	0.108016
18	18	-0.244015
19	19	0.554338
20	20	0.207503
21	21	-0.282784
22	22	-0.194279
23	23	-0.497689
24	24	-0.079294
25	25	-0.629677
26	26	0.023346
27	27	-0.480344
28	28	-0.130450
29	29	0.118599

Sumber : Olah Data Eviews 12